

**PENGARUH TEMUAN AUDIT, RASIO KEMANDIRIAN, DANA
PERIMBANGAN, TEKANAN POLITIK DAN KARAKTERISTIK
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGUNGKAPAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

(Tesis)

Oleh

Ferryansah
NPM 2221031031



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**PENGARUH TEMUAN AUDIT, RASIO KEMANDIRIAN, DANA
PERIMBANGAN, TEKANAN POLITIK DAN KARAKTERISTIK
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGUNGKAPAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Oleh

Ferryansah

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU AKUNTANSI**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

Pengaruh Temuan Audit, Rasio Kemandirian, Dana Perimbangan, Tekanan Politik Dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Oleh

Ferryansah

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh temuan audit, rasio kemandirian, dana perimbangan, tekanan politik dan karakteristik pemerintah daerah, terhadap pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera. Penelitian dilakukan terhadap pemerintah daerah se-Sumatera, Wilayah Pulau Sumatera terdiri dari 10 provinsi dan 154 pemerintah daerah kabupaten/kota dengan jumlah observasi selama 2 tahun yaitu tahun 2021 dan tahun 2022 sebesar 308 item observasi. Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel rasio kemandirian, dana perimbangan, dan karakteristik pemerintah daerah yang terdiri dari populasi dan kekayaan daerah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera. Sedangkan variabel temuan audit dan tekanan politik terbukti mempunyai pengaruh yang positif terhadap pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera, dengan variabel yang mempunyai pengaruh terbesar yaitu temuan audit.

Kata Kunci: Pengungkapan Laporan Keuangan, Temuan Audit, Rasio Kemandirian, Dana Perimbangan, Tekanan Politik, Jumlah penduduk, Kekayaan Daerah.

ABSTRACT

The Influence of Audit Findings, Independence Ratio, Intergovernmental Revenue, Political Pressure and Regional Government Characteristics on Disclosure of Regional Government Financial Reports

By

Ferryansah

This research aims to analyze the influence of audit findings, independence ratio, intergovernmental revenue, political pressure and regional government characteristics, on the disclosure of financial reports of Regency/City Regional Governments in Sumatra. The research was conducted on regional governments throughout Sumatra, the Sumatra Island Region consisting of 10 provinces and 154 district/city regional governments with a total of 2 years of observations, namely 2021 and 2022 amounting to 308 observation items. The research results prove that the variables of independence ratio, intergovernmental revenue, and regional government characteristics consisting of population and regional wealth do not have a significant influence on the disclosure of financial reports of Regency/City Regional Governments in Sumatra. Meanwhile, the variables audit findings and political pressure were proven to have a positive influence on the disclosure of financial reports of Regency/City Regional Governments in Sumatra, with the variable having the greatest influence, namely audit findings.

Keywords: Financial Report Disclosure, Audit Findings, Independence Ratio, Intergovernmental Revenue, Political Pressure, Population, Regional Wealth.

Judul Tesis : **PENGARUH TEMUAN AUDIT, RASIO KEMANDIRIAN, DANA PERIMBANGAN, TEKANAN POLITIK DAN KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH**

Nama Mahasiswa : **Ferryansah**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2221031031

Program Studi : Magister Ilmu Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

MENYETUJUI

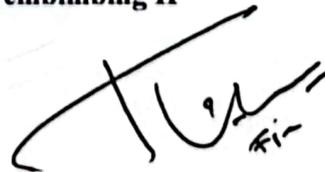
1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., CA., CPA.
NIP 19560620 198603 1003



Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.
NIP 19761023 200212 1002

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi



Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si. Ak.
NIP 19750620 200012 2001

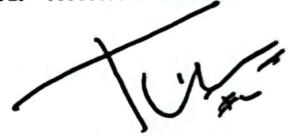
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., CA., CPA.



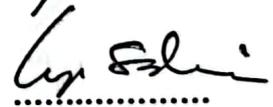
Sekretaris : Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.



Penguji Utama : Prof. Yuliansyah, S.E., M.S.A., Ph.D., Akt.



Anggota Penguji : Dr. Usep Syaipudin, S.E., M.S.Ak.



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP 19660621 199003 1003

3. Direktur Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP 19640326 198902 1001

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 13 Agustus 2024

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ferryansah

NPM : 1211031038

Dengan ini menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul “Pengaruh Temuan Audit, Rasio Kemandirian, Dana Perimbangan, Tekanan Politik Dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya, selain itu atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 13 Agustus 2024



Ferryansah
NPM. 2221031031

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Tangerang pada 13 Februari 1995 sebagai putra pertama dari dua bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak Di TK Al-Azhar Bandar Lampung tahun 2000, kemudian pendidikan dasar di SDN 01 Kedaton Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2006, penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 23 Bandar Lampung pada tahun 2009, dan kemudian menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 9 Bandar Lampung hingga lulus pada tahun 2012.

Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung pada tahun 2012. Pada tahun 2022, penulis kembali melanjutkan pendidikan di Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung hingga lulus pada tahun 2024. Selama menjadi mahasiswa magister penulis aktif bekerja sebagai Auditor di Kantor Akuntan Publik (KAP) Weddie Andriyanto dan Muhaemin.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbilalamin

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala karunia, berkah dan rahmat yang begitu besar kepada penulis.

Kupersembahkan tesis ini kepada :

Kedua orangtuaku tercinta, Ayah dan Ibu

Terimakasih yang tiada tara kepada Ayah dan Ibu yang selalu memberikan doa yang tiada henti, nasihat yang bermanfaat, kekuatan dalam segala kondisi, dan selalu memberikan dukungan untuk cita-citaku. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan di dunia maupun di akhirat untuk Ayah dan Ibu.

Adikku tercinta, Nenek dan Kakek Tersayang serta Om dan Tante

Terbaik.

Terimakasih atas segala keceriaan, canda tawa, kasih sayang, pengertian dan dukungannya selama ini.

Seluruh keluarga, sahabat dan teman-teman kantorku.

Terimakasih selalu memberikan semangat, doa, dan dukungan yang tiada henti.

Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

*This Research dedicated for my Families and Friends-Thank you for every kind.
You keep me swimming.*

MOTTO

“Just Keep Swimming”
(finding dory)

SANWACANA

Bismillahirrohmaanirrohim,

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Pengaruh Temuan Audit, Rasio Kemandirian, Dana Perimbangan, Tekanan Politik Dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Penyusunan tesis guna melengkapi dan memenuhi sebagian persyaratan untuk meraih gelar Magister Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Penulisan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan berupa pengarahan, bimbingan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian tesis ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si. Ak. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang selalu memberikan dukungan dan motivasi yang baik dalam penyelesaian tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., CA., CPA. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Akademik yang telah memberikan waktu, bimbingan, nasihat, saran, pengarahan, dukungan, dan motivasi yang sangat berharga dalam proses penyelesaian tesis ini dan juga selama proses perkuliahan berlangsung.
4. Bapak Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si. selaku Pembimbing Kedua dan Pembimbing Akademik yang telah memberikan waktu, bimbingan, nasihat, saran, pengarahan, dukungan, dan motivasi yang sangat berharga dalam proses penyelesaian tesis ini.
5. Bapak Prof. Yuliansyah, S.E., M.S.A., Ph.D., Akt. selaku Penguji Utama yang telah memberikan saran-saran, motivasi dan masukan yang membangun terhadap tesis ini, serta untuk segala bantuan dan kemudahan yang telah Ibu berikan.
6. Bapak Dr. Usep Syaipudin, S.E., M.S.Ak. selaku Anggota Penguji yang telah memberikan saran-saran, motivasi dan masukan baik terhadap tesis ini, serta untuk segala bantuan dan kemudahan yang telah Bapak berikan.
7. Bapak R. Weddie Andriyanto, S.E., M.Si., CA., CPA selaku Pimpinan KAP Weddie Andriyanto dan Muhaemin. Terimakasih telah memberikan kesempatan bekerja dan belajar serta segala kemudahan izin yang telah Bapak berikan.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya, serta pembelajaran selama proses perkuliahan berlangsung.

9. Seluruh karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung atas bantuan dan pelayanan yang baik selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Lampung.
10. Ayah dan Ibu yang selalu memberikan semangat, cinta, kasih sayang, serta tulus dan ikhlas dalam mendukung dan berdo'a untuk setiap langkahku menuju kesuksesan dunia dan akhirat.
11. Kakek dan Nenek Tersayang yang telah memberikan kasih sayang yang tulus, doa yang tiada henti, serta dukungan secara moril dan materil dalam pencapaian cita-citaku.
12. Paman dan tante terbaik seperti orang tua kedua. Terimakasih telah memberikan perhatian serta dukungan secara moril dan materil dalam pencapaian cita-citaku.
13. Adik dan saudara-saudara sepupu tersayang yang selalu mendukung dan selalu ada dalam keadaan apapun.
14. Seluruh keluarga besar tercinta yang selalu memberikan semangat, doa dan dukungannya.
15. Teman seperjuangan tugas dan tesis; Mba Yuli, Kak Nissa, Mba Diah, Rifki dan Bang Ardiles yang selalu memberikan dukungan dan menjadi bagian dari perjuangan ini. Terimakasih untuk bantuan, suka dan dukanya selama proses perkuliahan. *My best prayers goes to you.*
16. Teman-teman Korea; Julio, Billy, Jimi, Ariqsi, Kak Nissa dan Cika. Dunia perkuliahanku tak akan berwarna tanpa kalian. Semoga persahabatan ini terus terjalin. *Saranghae (사랑해) and See you on top!*
17. Teman-teman seperjuangan di MIA 2022 yang selalu memberikan dukungan dan menjadi bagian dari perjuangan ini.
18. Seluruh keluarga KAP Weddie Andriyanto dan Muhaemin. Bu Fajar, Mba Essy, Mba Susan, Sunu dan teman-teman lainnya. Terimakasih banyak telah memberikan izin belajar serta dukungan moril dan materil.
19. Teman belajar Pak Fatkhur, Mba Feny dan Bang Roy. Terimakasih atas bantuan dan dukungannya.
20. *My Endorphin*; Tiara Anggina Putri S.IP, dr. Maulana Rizal. SpM dan Elizabeth Sihaloho S.Kom. Terimakasih telah memberikan motivasi, semangat, jemputan hingga traktiran. *Thank you for being my Happy Chemicals.*
21. Sahabat-sahabatku, yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu yang telah membersamai dalam kondisi apapun, selalu ada dalam suka dukaku, selalu memberi dukungan, semangat, serta do'a yang tiada henti.
22. Seluruh pihak yang telah membantu selama proses perkuliahan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam proses penulisan tesis ini, maka penulis mengharapkan adanya kritik dan juga saran yang dapat membantu penulis dalam menyempurnakan tesis ini. Penulis juga berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua yang membacanya dan penulis juga berharap semoga Allah SWT membalas kebaikan orang-orang yang telah membantu dalam penulisan tesis ini. Terimakasih.

Bandarlampung, 13 Agustus 2024

Ferryansah

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
RIWAYAT HIDUP	vi
PERSEMBAHAN	vii
SANWACANA	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 <i>Grand Theory</i>	14
2.2 Pengungkapan (<i>disclosure</i>) Laporan Keuangan	21
2.3 Temuan Audit	28
2.4 Rasio Kemandirian	33
2.5 Dana Perimbangan / <i>Intergovernmental Revenue</i>	36
2.6 Tekanan Politik	39
2.7 Karakteristik Pemerintah Daerah	41
2.7.1 Populasi / Jumlah Penduduk	41
2.7.2 Kekayaan Daerah	42
2.8 Penelitian Terdahulu	43
2.9 Pengembangan Hipotesis	48
2.10 Kerangka Pemikiran	55

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data	57
3.2 Populasi dan Sampel	57
3.3 Definisi Operasional Variabel	58
3.4 Teknis Analisis Data	61
3.5 Uji Hipotesis	61
3.5.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	61
3.5.2 Uji Statistik F	62
3.5.3 Uji Statistik t	62

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Hasil Penelitian.....	63
4.1.1	Sampel Penelitian	63
4.1.2	Deskripsi Variabel	64
4.2	Regresi Data Panel	74
4.2.1	Model Regresi Data Panel	74
4.2.2	Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel	76
4.2.3	Uji Asumsi Klasik	77
4.2.4	Hasil Uji Hipotesis	79
4.2.4.1	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	81
4.2.4.2	Hasil Uji Statistik F.....	82
4.2.4.3	Hasil Uji Parsial	82
4.3	Pembahasan	84

V. SIMPULAN DAN SARAN .

5.1	Simpulan.....	95
5.2	Keterbatasan Penelitian	95
5.3	Implikasi.....	96
5.4	Saran	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1. Peringkat Survei E-Government Indonesia.....	2
Tabel 1. 2. Rangkuman Penelitian Pengungkapan Wajib di Indonesia	6
Tabel 1. 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Se-Sumatera	7
Tabel 2. 1. Elemen Pengungkapan Wajib	26
Tabel 2. 2. Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	35
Tabel 2. 3. Penelitian Terdahulu.	43
Tabel 4. 1. Jumlah Pemerintah Daerah Sampel Penelitian	63
Tabel 4. 2. Deskripsi Variabel Penelitian.....	64
Tabel 4. 3. Deskripsi Variabel Temuan Audit Per Provinsi.....	65
Tabel 4. 4. Deskripsi Variabel Tingkat Kemandirian Per Provinsi.....	66
Tabel 4. 5. Deskripsi Variabel Intergovernmental Revenue Per Provinsi	67
Tabel 4. 6. Deskripsi Variabel Tekanan Politik Per Provinsi	68
Tabel 4. 7. Deskripsi Variabel Jumlah Penduduk Per Provinsi	69
Tabel 4. 8. Deskripsi Variabel Kekayaan Daerah Per Provinsi	70
Tabel 4. 9. Deskripsi Variabel Pengungkapan LK Per Provinsi	71
Tabel 4. 10. Rata-rata Variabel Penelitian (Kabupaten dan Kota).....	71
Tabel 4. 11. Hasil Regresi Model Common Effect	74
Tabel 4. 12. Hasil Regresi Model Fixed Effect.....	75
Tabel 4. 13. Hasil Uji Chow.....	76
Tabel 4. 14. Hasil Uji Heteroskedastisitas	78
Tabel 4. 15. Hasil Uji Autokorelasi	78
Tabel 4. 16. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	81
Tabel 4. 17. Hasil Uji F-Statistik	82
Tabel 4. 18. Hasil Uji Parsial	82

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. 1. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah.....	4
Gambar 2. 1. Kerangka Pemikiran.....	56
Gambar 4. 1. Hasil Uji Normalitas.....	77
Gambar 4. 2. Means Variabel Rasio Kemandirian Per Provinsi.....	87
Gambar 4. 3. Means Variabel Intergovernmental revenue Per Provinsi.....	89

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan perkembangan tata kelola pemerintahan yang sangat dinamis. Tata kelola pemerintahan yang baik (*Good governance*) menjadi tuntutan masyarakat terhadap pengelolaan organisasi sektor publik. Governance mengandung makna bagaimana cara suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumberdaya dan berbagai masalah yang dihadapi Masyarakat (Moento *et al.*, 2019). Kemudian secara implisit kata *good* dalam *good governance* sendiri mengandung dua pengertian; pertama, nilai yang menunjang tinggi kehendak rakyat dan nilai yang meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan kemandirian dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut (Effendi, 2016).

Good governance merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh tiga komponen yakni pemerintah, rakyat, dan swasta/bisnis (Palangda & Dame, 2020). *Good governance* diukur dengan menggunakan *Indonesian Governance Index* (IGI). IGI merupakan alat untuk mengukur kinerja pemerintahan daerah, khususnya terhadap empat pilar pemerintahan yaitu arena pemerintah (legislatif dan eksekutif), birokrasi, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi berdasarkan beberapa kriteria data yang obyektif dan terukur (Effendi, 2016). Salah satu ukuran penyelenggaraan pemerintah di suatu negara adalah *E-Government*, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) telah merilis hasil survei *E-Government* tahun 2022. Hasilnya yaitu posisi Indonesia naik signifikan dari peringkat 88 di tahun 2020 menjadi peringkat 77 di tahun 2022.

Tabel 1. 1. Peringkat Survei E-Government Indonesia

Tahun	Peringkat	Nilai
2012	97	0.49486
2014	106	0.49486
2016	116	0.44784
2018	107	0.52580
2020	88	0.66120
2022	77	0.71600

Sumber: (United Nations, 2023)

Penerapan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan Negara akan terkait erat dengan masalah akuntabilitas dan transparansi khususnya dalam hal pengelolaan keuangan Negara. Hal ini disebabkan karena keuangan Negara menduduki posisi strategis guna mendukung pembangunan bangsa, baik dari segi sifat, jumlah serta pengaruhnya pada kemajuan, ketahanan, dan kestabilan perekonomian bangsa. Oleh sebab itu, Pemerintah daerah wajib secara terus menerus melakukan upaya perbaikan atas aspek transparansi dan akuntabilitas dari pengelolaan keuangannya (Napitupulu *et al.*, 2020).

Sementara itu, untuk tata Kelola pemerintahan daerah di Indonesia, sampai dengan saat ini belum ada regulasi khusus yang disahkan sampai tulisan ini dibuat indeks tata Kelola pemerintahan daerah baru sampai pada tahap uji coba (beritasatu.com, 2023). Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD) merupakan bagian dari indeks yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), penyusunan ITKPD melibatkan Kemitraan Partnership dan *United States Agency for International Development* (USAID) (BSKDN, 2022). Atau dengan kata lain, ITKPD merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk mengukur sejauh mana implementasi tata kelola pemerintahan yang baik di suatu daerah. Namun kenyataannya, belum semua pemerintah daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan keuangan tersebut secara efisien.

Seiring dengan perkembangannya, kini masing-masing Pemerintah Daerah kabupaten atau kota memiliki hak dan kewajiban untuk mengembangkan berbagai macam potensi yang ada di daerah dengan didasarkan pada prinsip demokrasi,

pemerataan, peran serta masyarakat, serta keadilan. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusannya sendiri yang disertai dengan pendanaannya, ternyata berimplikasi terhadap makin meningkatnya kasus korupsi di daerah. Hal ini misalnya terlihat dari hasil laporan BPK yang mengindikasikan adanya kerugian negara dalam laporan keuangan terutama di pemerintah daerah di seluruh Indonesia (Fajaruddin, 2021).

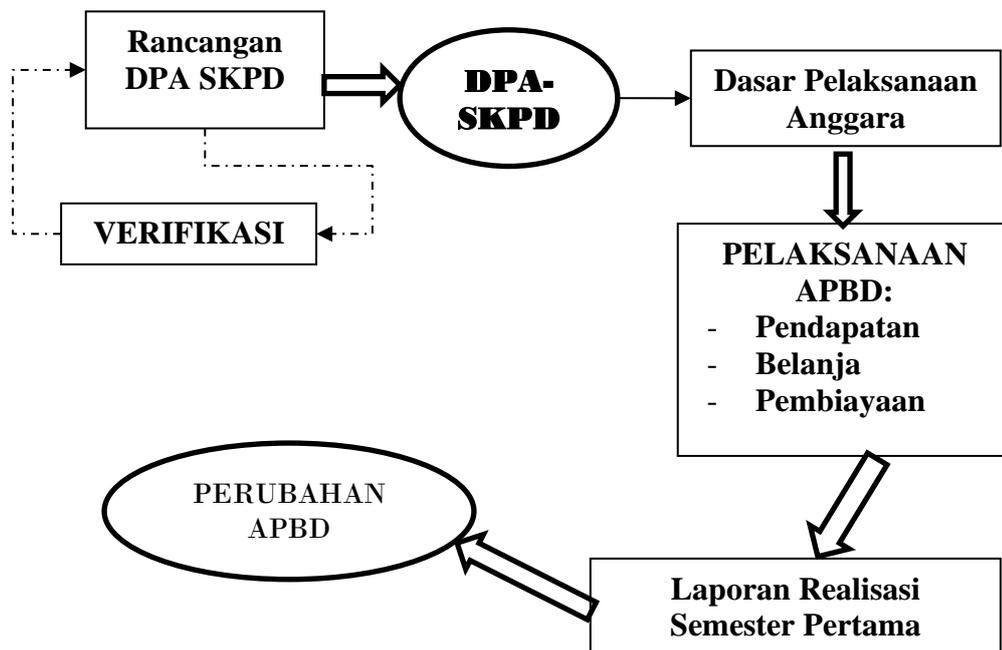
Berdasarkan hal tersebut, maka pelimpahan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah ini juga turut disertai oleh adanya pengaturan, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, pembagian, serta juga perimbangan keuangan. (Amaliah & Haryanto, 2019). Salah satu prasyarat untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan dimana pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik dalam rangka melaksanakan amanat rakyat.

Laporan keuangan yang jelas dan transparan dibutuhkan bagi para pembaca untuk membantu dalam pengambilan keputusan terkait dengan politik, sosial, serta ekonomi secara berkualitas. Laporan keuangan tetap menjadi penting demi mewujudkan pengambilan keputusan yang tepat dari informasi keuangan di dalamnya (Kusuma *et al.*, 2021). Tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan daerah merupakan salah satu unsur penting yang harus dijaga demi menjaga akuntabilitas keuangan pemerintah. Besarnya tingkat ketergantungan daerah dan kompleksitas pemerintahan diduga merupakan faktor pendorong bagi pemerintah daerah dalam menjaga reputasi melalui akuntabilitas laporan keuangannya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara khusus tujuan pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi yang berguna

untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Menurut Modlin, (2019) pemerintah dalam menjalankan kegiatan pengelolaan keuangan harus memperhatikan beberapa hal seperti: perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan regional pengawasan keuangan. Hal tersebut merupakan upaya yang dapat dilakukan pemerintah agar dapat mewujudkan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan pengelolaan keuangan pemerintahannya, maka secara tidak langsung baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib untuk dapat menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas kinerja keuangan dari pemerintah daerah, dengan cara menyajikan sebuah laporan keuangan (Kusuma *et al.*, 2021). Berikut alur pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah:



Gambar 1. 1. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Sumber: (Kementrian Keuangan RI, 2017b)

Berdasarkan situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, alur pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah

dimulai dari menyusun dan menyampaikan rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) paling lambat 3 hari kerja setelah APBD ditetapkan. Kemudian Tim anggaran pemerintah daerah bersama dengan kepala SKPD yang bersangkutan melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD. DPA-SKPD yang telah disahkan disampaikan kepada Kepala SKPD yang bersangkutan, Kepala satuan kerja pengawasan daerah, dan BPK paling lambat 7 hari kerja sejak tanggal disahkan. Pelaksanaan APBD terdiri dari pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kemudian setelah satu semester, Pemerintah daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya. Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan (Kementrian Keuangan RI, 2017b). Pembuatan laporan keuangan pemda dilakukan oleh PPKD dengan cara melakukan konsolidasi atas laporan keuangan yang dihasilkan oleh SKPD-SKPD.

Salah satu cara yang dapat digunakan dalam menyampaikan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan adalah dengan melakukan pengungkapan. Pengungkapan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan akan memudahkan para pengguna dalam memahami laporan keuangan tersebut (Padang, 2022). Pengungkapan dan penyediaan informasi merupakan poin terpenting dalam laporan keuangan. Sehingga dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Soleman *et al.*, 2019). Pengungkapan di dalam laporan keuangan terbagi menjadi dua bagian yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) serta pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Laporan keuangan untuk memenuhi tujuan akuntabilitas harus menyajikan secara lengkap (*full disclosure*) informasi yang dibutuhkan oleh pengguna baik pada halaman muka (*on the face*) maupun dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) (Carolina, 2019).

Terdapat fenomena yang dihasilkan beberapa penelitian sebelumnya mengenai praktik pengungkapan wajib telah dilakukan di sektor publik termasuk entitas pemerintah daerah, yang penulis rangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1. 2. Rangkuman Penelitian Pengungkapan Wajib di Indonesia

No	Peneliti	Wilayah Penelitian	Tingkat Pengungkapan
1	Suwarjuwono & Ritonga	Pemda di Pulau Jawa	40,35%
2	Iqbal	PemProv di Indonesia	53,79% tahun 2013 dan 56,14 pada tahun 2014
3	Putri & Arza	LKPD se-Sumatera Barat	61%
4	Sari <i>et al</i>	Sumatera	55,38%
5	Luthfi & Sari	Sumatera	54,47%

Sumber: Peneliti, 2023

Penelitian yang dilakukan oleh Suwarjuwono & Ritonga, (2017) meneliti tingkat pengungkapan akun persediaan dalam LKPD di Jawa Tahun 2014 memperoleh hasil tingkat pengungkapan akun persediaan dalam LKPD Jawa masih rendah sebesar 40,35% serta belum sesuai dengan SAP. Penelitian yang dilakukan oleh Iqbal, (2018) memperoleh hasil bahwa rata-rata tingkat pengungkapan wajib LKPD masih rendah, yaitu 53,79% tahun 2013 dan 56,14 pada tahun 2014. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Putri & Arza, (2019) mengenai tingkat pengungkapan wajib LKPD se-Sumatera Barat tahun 2015-2017 memperoleh hasil rata-rata tingkat pengungkapan wajib masih rendah sebesar 61%. Penelitian yang dilakukan oleh Sari *et al.*, (2021) hasil penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa rata-rata tingkat pengungkapan akun persediaan di Sumatera masih rendah sebesar 55,38%. Penelitian yang dilakukan oleh Luthfi & Sari, (2023) memberikan bukti bahwa rata-rata tingkat pengungkapan LKPD pada kabupaten/kota di Sumatera tahun 2020 memperoleh hasil sebesar 54,47% masih tergolong rendah dan tidak satupun LKPD yang melakukan pengungkapan secara penuh atau 100% sesuai dengan pengungkapan yang memadai dalam CaLK.

Selain hasil penelitian tersebut, berdasarkan observasi peneliti dari sepuluh provinsi yang ada di wilayah Sumatera, hanya beberapa provinsi yang mempunyai

data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 yang dapat diakses oleh publik melalui website pemerintah daerah masing-masing:

Tabel 1. 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Se-Sumatera

No	Provinsi	Ada	Tidak ada
1	Aceh		✓
2	Bengkulu		✓
3	Jambi		✓
4	Lampung		✓
5	Kepulauan Bangka Belitung	✓	
6	Kepulauan Riau		✓
7	Riau	✓	
8	Sumatera Barat		✓
9	Sumatera Selatan	✓	
10	Sumatera Utara	✓	

Sumber: Peneliti, 2023

Berdasarkan observasi peneliti, dapat disimpulkan pemerintah daerah se-Sumatera belum sepenuhnya transparan, tentunya hal ini sedikit banyak melanggar prinsip keterbukaan yang dewasa ini terus digaungkan oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan tersebut maka pemerintah daerah di wilayah Sumatera menjadi objek menarik untuk diteliti. Penelitian ini menarik dilakukan karena masih sedikitnya penelitian mengenai topik ini dikarenakan informasi yang didapatkan terbatas dan sulitnya diakses data dari pemerintah, dan juga informasi bersifat cenderung rahasia. Kualitas laporan keuangan yang baik tercermin dari semakin tingginya tingkat pengungkapan laporan keuangan, berdasarkan fenomena maka penulis berasumsi bahwa rata-rata tingkat pengungkapan LKPD pada pemerintah daerah di Indonesia masih rendah, salah satu yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan adalah temuan audit.

Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK dalam laporan keuangan pemerintah daerah atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Naopal *et al.*, 2017). Priharjanto & Wardani, (2017) menyatakan bahwa temuan dan rekomendasi dikomunikasikan untuk tindakan korektif. Hasil tersebut memiliki tujuan untuk mengungkapkan kualitas penyajian laporan keuangan secara umum karena

mengalami peningkatan jika dibanding periode tahun lalu, hal ini tentu perlu peningkatan dalam pelaksanaan tindak lanjut dari rekomendasi.

Oleh karena itu, sesuai dengan teori *signalling*, pemerintah daerah cenderung akan mengungkapkan informasinya apabila mendapatkan banyaknya temuan atau rekomendasi maka semakin besar pula jumlah tambahan pengungkapan yang akan diminta oleh BPK dalam laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian Rizta & Nazwar, (2021) temuan audit secara parsial berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, berlawanan dengan hasil penelitian Marliani *et al.*, (2018) bahwa temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Selain temuan audit, faktor lain yang dapat mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan suatu daerah adalah tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat atau disebut juga dengan rasio kemandirian. Hal ini diduga dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah dimana pada penelitian Rizta & Nazwar, (2021) serta Finakesti *et al.*, (2022) membuktikan adanya pengaruh positif signifikan dari variabel rasio kemandirian terhadap variabel tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan pemda. Akan tetapi hasil riset Utami & Sulardi, (2020) memberikan bukti bahwa rasio kemandirian daerah tidak memengaruhi pengungkapan laporan keuangan pemda.

Menurut Nur & Murwaningsari, (2020) peningkatan pengungkapan informasi keuangan biasanya didorong oleh semakin besarnya *intergovernmental revenue*, hal ini disebabkan bentuk tanggungjawab pemda kepada pihak pemerintah pusat atas pengelolaan keuangannya. *Intergovernmental revenue* atau di Indonesia sering disebut dana perimbangan, merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi. Namun pada pelaksanaannya perlu adanya pengawasan sebagai bentuk keterbukaan dan akuntabilitas (Lesmanawati, 2019). Berdasarkan hasil penelitian Putri dkk (2022) Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah. Sedangkan menurut penelitian Lesmanawati (2019)

intergovernmental revenue berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adiputra *et al.*, (2018) menjelaskan bahwa lingkungan politik merupakan salah satu faktor yang berperan dalam mewujudkan transparansi pada tingkat pemerintah daerah. Kebijakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dalam mencapai tujuannya sering bertentangan satu sama lain, sehingga sering terjadi konflik kepentingan, baik antara sesama pejabat politik maupun dengan Masyarakat atau publik. Para pengamat politik setuju bahwa hal tersebut dapat terjadi apabila para pejabat memiliki kekuatan atau kekuasaan pada suatu wilayah tertentu. Hal ini diduga dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Yudistira & Rohman, (2022) Lingkungan Politik berpengaruh secara positif terhadap transparansi pemerintah daerah, berlawanan hasil dengan penelitian Mistika & Deviani, (2023) yang memberikan bukti bahwa kompetisi politik yang terdapat dalam pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi informasi pemerintah daerah.

Terkait dengan latar belakang pada penelitian ini, terdapat beberapa penelitian empiris lainnya yang membahas tentang pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap pengungkapan laporan keuangan. Karakteristik pemda adalah karakteristik khusus atau spesifik yang melekat pada pemda, untuk menandai suatu daerah (kabupaten atau kota), dan untuk membedakan dengan pemda satu dengan pemda yang lain (Okfitasari *et al.*, 2020). Pada penelitian ini, karakteristik pemda diprosikan dengan populasi, dan kekayaan daerah.

Populasi atau jumlah penduduk di Indonesia ditentukan melalui sensus penduduk yang selama ini dilakukan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) setiap sepuluh tahun. Populasi merupakan proksi kompleksitas pemda, di mana semakin tinggi populasi atau semakin kompleks sebuah pemda, maka semakin tinggi pula pengungkapan yang semestinya disampaikan pada laporan keuangan. Hasil penelitian Utami dan Sulardi (2019) menunjukkan variabel populasi berpengaruh positif pada

pengungkapan laporan keuangan pemda, sedangkan hasil penelitian (Dianti & Herawati, 2022) dan Kusuma *et al.*, (2021) memberikan hasil bahwa jumlah penduduk, tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah provinsi.

Faktor terakhir yang diduga berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah adalah kekayaan daerah. Pada daerah yang memiliki kekayaan yang besar akan cenderung disalahgunakan, sehingga perlu adanya pengawasan dari masyarakat terhadap pemerintah daerah tersebut. Dampaknya publik perlu menuntut keterbukaan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah (Jessica & Suhartono, 2020). Kekayaan daerah merupakan gambaran kemakmuran suatu daerah, Berdasarkan hasil penelitian Hadi & Setiawan, (2020) Kekayaan pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah, sedangkan hasil penelitian berbeda dibuktikan oleh Kurniati & Siddi, (2020) yang memberikan hasil kekayaan pemerintah daerah meningkatkan kemungkinan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) masih menjadi perdebatan. Namun dari hasil penelitian terdahulu masih terdapat perbedaan-perbedaan. Berdasarkan penelitian terdahulu ada beberapa variabel yang memiliki hasil yang berbeda yaitu temuan audit, tingkat ketergantungan, dana perimbangan, jumlah penduduk, dan kekayaan daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang tidak konsisten dengan variabel-variabel tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk menganalisis lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota Pemerintah daerah di Sumatera dengan menggunakan data terbaru yaitu data tahun 2021-2022. Penelitian ini juga menambahkan variabel tekanan politik mengacu dari penelitian Yudistira & Rohman, (2022) serta Nosihana & Yaya, (2016) yang diukur dengan jumlah

persentase suara yang tidak memilih kepala daerah yang menjabat, sebagai pembeda dan keterbaruan dari penelitian sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, adanya gap empiris antara beberapa hasil penelitian terdahulu serta keterbaruan ide penelitian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Temuan Audit, Rasio Kemandirian, Dana Perimbangan, Tekanan Politik Dan Karakteristik Pemerintah Daerah, Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh temuan audit terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sumatera?
2. Bagaimana pengaruh rasio kemandirian terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sumatera?
3. Bagaimana pengaruh dana perimbangan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sumatera?
4. Bagaimana pengaruh tekanan politik terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sumatera?
5. Bagaimana pengaruh populasi terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sumatera?
6. Bagaimana pengaruh kekayaan daerah terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sumatera?

1.3 Tujuan Penelitian

Atas rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka telaah ini bertujuan:

1. Untuk menguji pengaruh temuan audit terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sumatera.
2. Untuk menguji pengaruh rasio kemandirian terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sumatera.

3. Untuk menguji pengaruh dana perimbangan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sumatera.
4. Untuk menguji pengaruh tekanan politik terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sumatera.
5. Untuk menguji pengaruh populasi terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sumatera.
6. Untuk menguji pengaruh kekayaan daerah terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sumatera.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi dengan perkembangan terbaru dalam bidang tata kelola keuangan publik di Indonesia. Dalam konteks tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas yang semakin kuat, penelitian ini menghadirkan aspek keterbaruan dengan memfokuskan pada faktor-faktor kritis yang dapat memengaruhi pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini turut mengangkat perspektif lokal dengan fokus pada pemerintah daerah di Sumatera. Hal ini memberikan keterbaruan dalam pemahaman tentang dinamika tata kelola keuangan di wilayah tersebut. Dengan menganalisis data dari seluruh pemerintah daerah di Sumatera, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang tren pengungkapan laporan keuangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di tingkat regional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi khususnya pemerintah daerah dalam menganalisis pengaruh temuan audit, rasio kemandirian, dana perimbangan, tekanan politik dan karakteristik pemerintah daerah, terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini juga dapat berguna bagi Pemerintah daerah untuk menjadi masukan dalam pelaksanaan kinerja pemerintah daerah untuk peningkatan pembuatan laporan keuangan pada periode berikutnya.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan literatur khususnya yang berkaitan dengan ilmu akuntansi khususnya akuntansi sektor publik dalam memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

c. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan pemerintah dalam hal sebagai regulator untuk memberikan kebijakan terkait pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Grand Theory*

2.1.1 Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik menurut Halim, (2015) adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Bastian, (2015) menyatakan istilah sektor spublik memiliki pengertian yang bermacam-macam, hal ini merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (politik, ekonomi hukum dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Akuntansi pemerintahan adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya.

Dari sudut pandang ekonomi sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas (kesatuan) yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Sejalan dengan perkembangan maka di negara kita Akuntansi Sektor Publik didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Dari definisi-definisi di atas Akuntansi Sektor Publik dapat dinyatakan sebagai suatu kegiatan jasa yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha, terutama yang bersifat keuangan guna pengambilan keputusan untuk menyediakan kebutuhan

dan hak publik melalui pelayanan publik yang diselenggarakan oleh entitas perusahaan.

Akuntansi sektor publik memiliki peranan yang vital dan menjadi subyek untuk didiskusikan baik oleh kalangan akademisi maupun praktisi sektor publik.

Akuntansi sektor publik bertujuan (Bastian, 2015):

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis atas alokasi suatu sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen.
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumberdaya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas.

Berdasarkan definisi diatas maka tujuan akuntansi sektor publik adalah untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisiensi dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi, memberikan informasi untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya. Menurut Mardiasmo, (2021) kehadiran akuntansi sektor publik juga dapat mewujudkan karakteristik dari Good Governance (pemerintahan yang baik) Karakteristik tersebut terdiri dari berbagai hal, antara lain sebagai berikut:

1. *Participation*. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.
2. *Rule of law*. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu,

3. *Transparency*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi.
4. *Responsiveness*. Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholder*.
5. *Consensus orientation*. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
6. *Equity*. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
7. *Efficiency and Effectiveness*. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (*efisien*) dan berhasil guna (*efektif*).
8. *Accountability*. Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
9. *Strategic vision*. Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.

Akuntansi Keuangan Daerah adalah proses mencatat, menilai, dan mengidentifikasi semua transaksi bisnis yang terjadi pada entitas Pemerintah Daerah, seperti provinsi, kota, atau kabupaten. Output berupa laporan keuangan dari Akuntansi Keuangan Daerah ditujukan kepada pihak-pihak seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Keuangan (BPK), kreditor, investor, donatur, dan pihak berkepentingan lainnya. Laporan keuangan pemerintah berbeda dengan laporan keuangan sektor swasta dalam beberapa hal. Perbedaan tersebut meliputi perbedaan jenis-jenis laporan keuangan, elemen laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, dan teknik akuntansi yang digunakan.

2.1.2 Agency Theory

Agency Theory adalah penerapan dalam organisasi modern. Teori agensi mementingkan pentingnya pemilik perusahaan atau pemegang saham dalam menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada jasa profesional yang disebut agen. Tujuan pemisahan pengelolaan dan kepemilikan perusahaan adalah agar pemilik

perusahaan menjalankan perusahaan melalui *staff profesional* mereka untuk memperoleh keuntungan maksimum dengan biaya yang paling efisien.

Fungsi dari *staff profesional* yaitu untuk melayani kepentingan para pemilik perusahaan dan memiliki kebebasan untuk mengambil alih manajemen perusahaan. Para profesional akan mewakili pemegang saham. Semakin besar perusahaan yang dikelola maka semakin besar juga keuntungan agen. Tetapi pemilik perusahaan atau pemegang saham hanya bertugas mengawasi dan memantau jalannya perusahaan yang dikelola oleh manajemen dan mengembangkan sistem insentif bagi manajemen untuk memastikan bahwa mereka bekerja untuk kepentingan perusahaan. Namun di sisi lain, memiliki kekurangan dimana adanya kebebasan manajemen untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dapat mengarah pada proses memaksimalkan keuntungan pemilik perusahaan, serta menanggung beban dan biaya yang harus ditanggung oleh pemilik perusahaan. Selain itu, pemisahan ini dapat menyebabkan kurangnya transparansi dalam penggunaan dana perusahaan dan keseimbangan yang tepat dari kepentingan yang ada. Misalnya antara pemegang saham dan manajemen perusahaan dan antara pemegang saham *mayoritas* dan *minoritas* (Tandiontong, 2016).

Menurut (Jensen & Meckling, 1976) dan Scott, (2015) dalam Umar, (2018) Teori Keagenan (*Agency Theory*) merupakan sebagai suatu versi dari *game theory* yang melaksanakan suatu perjanjian antara dua atau lebih pihak, dimana salah satu pihak disebut *agen* dan pihak yang lain disebut *principal*. *Principal* mendelegasikan tanggung jawab untuk pengambilan keputusan kepada *agen*. *Prinsipal* juga dapat dikatakan memastikan agen untuk melakukan tugas-tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Wewenang dan tanggung jawab *agen* ataupun *principal* telah di atur di dalam kontrak kerja atas persetujuan kedua belah pihak.

Teori Keagenan (*Agency Theory*) menjelaskan bahwa perlunya jasa independen auditor yang dijelaskan di dasar teori keagenan (*Agency Theory*), yaitu hubungan

antara pemilik (*prinsipal*) dengan manajemen (*agen*). Dalam perkembangan perusahaan dan entitas bisnis yang lebih besar, maka konflik sering muncul antara klien, dalam hal ini pemegang saham (*investor*) dan pihak *agen* di wakili oleh manajemen (direksi). Anggapan bahwa manajemen yang terlibat dalam suatu perusahaan selalu memaksimalkan nilai perusahaan tidak selalu terpenuhi. Karena pemilik perusahaan memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan pemilik perusahaan, *asymetric information* menimbulkan masalah yang disebut dengan masalah keagenan. Menurut Silaban *et al.*, (2020) Untuk mengurangi adanya masalah agensi maka diperlukan adanya pihak independen yang dapat menjadi pihak penengah untuk menangani konflik tersebut yang lebih dikenal sebagai independen auditor. Karena auditor dianggap sebagai pihak independen antara *agen* yang bertugas sebagai penyedia informasi laporan keuangan dan para *stakeholders* yang bertugas sebagai pengguna informasi sehingga dapat mengurangi *asymetry information* (Rosadi & Okfitasari, 2019).

Pada penelitian Sari *et al.*, (2015) menyatakan bahwa teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen. Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai agent bagi masyarakat (*principal*) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat. *Agency theory* beranggapan bahwa banyak terjadi information asymmetry antara pihak agen (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak prinsipal (masyarakat). Adanya *information asymmetry* inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh agen. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan pengendalian internalnya atas kinerjanya sebagai mekanisme *checks and balances* agar dapat mengurangi *information asymmetry*.

Teori keagenan tidak hanya diaplikasikan dalam sektor swasta yang berkiblat pada orientasi laba atau profit oriented namun juga pada sektor publik yang dalam hal ini adalah pemerintahan. Pada sektor publik, principal diwakili oleh rakyat yang dalam hal ini dipresentatitkan dengan legislatif (DPRD) sedangkan agent dipresentatitkan dengan eksekutif (pemerintah). Hubungan keterkaitan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah pada saat penyusunan APBD (Putri & Arza, 2019).

Sebagai pengawasan pada perilaku pemerintah serta untuk menyelaraskan tujuan rakyat dan pemerintah, rakyat menginginkan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah melalui mekanisme pelaporan keuangan secara periodik. Melalui laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab pemerintah, rakyat melalui legislatif dapat menilai sekaligus mengawasi kinerja pemerintah yang nantinya legislatif dapat mengetahui seberapa jauh tingkat kepatuhan pemerintah terhadap peraturan yang ada dan tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan daerahnya. Tingkat kepatuhan pengungkapan laporan keuangan disini dapat dilihat dari seberapa besar laporan keuangan tersebut mengacu dan sesuai pada butir butir pengungkapan yang diwajibkan dalam SAP (Silaban & Suryani, 2020).

2.1.3 Teori Legitimasi

Legitimasi adalah hal yang penting dalam organisasi, mengandung batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial serta reaksi-reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Deegan dan Tobin (2002) menyatakan bahwa legitimasi perusahaan akan diperoleh, jika terdapat kesamaan antara hasil dengan yang diharapkan oleh masyarakat dari perusahaan, sehingga tidak ada tuntutan dari masyarakat. Perusahaan dapat melakukan pengorbanan sosial sebagai refleksi dari perhatian perusahaan terhadap masyarakat. Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan menggunakan laporan

tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan, sehingga mereka diterima oleh masyarakat (Deegan, 2004).

Teori legitimasi merupakan kontrak sosial antara masyarakat dengan perusahaan yang mempunyai tujuan dari perusahaan agar target tercapai tanpa ada menimbulkan kerugian untuk masyarakat dan perusahaan tersebut. Legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan masyarakat (*society*), pemerintah individu, dan kelompok masyarakat (Rimayanti & Jubaedah, 2017). Dalam teori legitimasi terdapat hubungan dengan pengungkapan laporan keuangan. Dengan adanya teori legitimasi, perusahaan atau pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan kinerja keuangan agar mendapat perhatian dari masyarakat. Berdasarkan teori legitimasi pemerintah daerah dianjurkan untuk mengungkapkan kinerjanya melalui laporan keuangan tahunan (Permatasari & Trisnawati, 2019).

Teori legitimasi menyebabkan pemerintah daerah berupaya meningkatkan kinerja keuangan demi mendapatkan sorotan publik. Berdasarkan teori legitimasi pemerintah daerah diharapkan mengungkapkan kinerjanya melalui laporan keuangan, hal ini sesuai dengan tujuan digunakan laporan keuangan dan laporan tahunan serta konsep pemerintahan yang baik untuk mengawasi manajer dalam melakukan tugasnya dalam melaporkan laporan keuangan tahunan dalam pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (Nuraeni & Rini, 2019).

Dalam hubungan dengan pemerintahan, pemerintah yang disebut sebagai legislatif atau DPRD mendapat tekanan dari organisasi lain untuk memiliki dampak pengaruh dalam pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Teori koersif dalam teori legitimasi adalah tekanan eksternal yang diberikan oleh pemerintah, peraturan atau lembaga lain untuk mengadopsi struktur dan sistem maka peraturan dapat menyebabkan adanya pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (Bastian, 2015).

2.2 Pengungkapan (*disclosure*) Laporan Keuangan

Pengungkapan informasi dalam Laporan Keuangan dilakukan untuk melindungi hak pemegang saham yang cenderung terabaikan akibat terpisahnya pihak manajemen yang mengelola perusahaan dan pemegang saham yang memiliki modal (Fahmi, 2015). *Disclosure* apabila dikaitkan dengan suatu data, berarti menyiapkan data yang bermanfaat bagi yang membutuhkan. Namun, jika dikaitkan dengan informasi *disclosure* ialah pengungkapan informasi yang dibutuhkan oleh seseorang untuk mendapatkan sebuah informasi. Sehingga, informasi yang dihasilkan harus lengkap, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan (Ghozali & Chariri, 2016).

Informasi dalam sebuah laporan keuangan disajikan dengan memadai sehingga dapat memungkinkan dilakukannya sebuah prediksi perihal kondisi keuangan, arus kas, dan profitabilitas perusahaan di masa yang akan datang. Informasi yang akan diungkapkan dalam laporan keuangan tentunya harus disesuaikan dengan kepentingan pengguna laporan keuangan. Dengan semakin transparan informasi yang disajikan oleh perusahaan serta semakin nyata penerapan tata kelola yang baik akan meningkatkan keberhasilan suatu bisnis dalam dunia usaha yang berkesinambungan dan juga dapat digunakan dalam memahami aktivitas operasional bisnis suatu perusahaan (Dewata *et al.*, 2020).

Pengungkapan di dalam laporan keuangan terbagi menjadi dua bagian yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) serta pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). *Mandatory disclosure* (pengungkapan wajib) merupakan salah satu bagian dalam laporan keuangan yang dapat dikemukakan oleh sebuah badan otoriter serta telah dirancang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Pengungkapan wajib ini juga merupakan sebuah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Standar Akuntansi Pemerintahan yang mempunyai tujuan untuk dapat mewujudkan keuangan publik yang bersifat transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan *voluntary disclosure* merupakan pengungkapan yang disajikan diluar item-item yang wajib diungkapkan sebagai tambahan informasi

bagi pengguna laporan keuangan (Suwardjono, 2015). Hal tersebut diperoleh dari pemikiran bahwa pengelolaan administrasi publik adalah isu utama pencapaian pemerintah yang bersih (*clean government*). Laporan keuangan untuk memenuhi tujuan akuntabilitas harus menyajikan secara lengkap (*full disclosure*) informasi yang dibutuhkan oleh pengguna baik pada halaman muka (*on the face*) maupun dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) (Carolina, 2019).

Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) merupakan pengungkapan yang diwajibkan dalam laporan tahunan menurut peraturan Bapepam, sedangkan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) merupakan pengungkapan yang tidak diwajibkan oleh Bapepam, atau dapat diartikan pengungkapan yang melebihi dari yang diwajibkan (Iriyanto & Nugroho, 2015). Pengungkapan wajib dipandang sebagai pengungkapan yang harus dipenuhi oleh perusahaan sehingga perusahaan diasumsikan mematuhi pengungkapan minimal yang diharuskan tersebut, karena jika pengungkapan minimal yang wajib tersebut tidak terpenuhi maka perusahaan akan dituntut untuk memenuhi kekurangannya, sehingga dapat diasumsikan bahwa perusahaan mentaati pengungkapan wajib (Yunifa & Agung, 2017).

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyajikan tentang posisi keuangan yang relevan dan transaksi-transaksi yang terjadi dalam satu periode pelaporan. Untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah dapat menggunakan laporan keuangan. Selain itu laporan keuangan juga bisa digunakan sebagai menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komponen yang harus disajikan oleh Pemerintah Daerah di dalam laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II. Berdasarkan pada PP tersebut, SAP dituangkan dalam sebuah standar yang

disebut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP). SAP dilengkapi dengan pengantar SAP dan merujuk pada Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. PP Nomor 71 tahun 2010 terdiri dari SAP Berbasis Akru-al, SAP Berbasis Kas menuju Akru-al, serta Proses Penyusunan SAP Berbasis Akru-al sebagai tiga lampiran utama. Menurut PP tersebut, pemda diwajibkan menyusun seperangkat laporan keuangan berikut ini :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyediakan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih laporan yang secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: a) Saldo Anggaran Lebih awal; b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih; c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan; d) Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya; e) Lain-lain; dan f) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan dari suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca berisi tentang sekurang-kurangnya pos-pos seperti, kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, dan kewajiban jangka panjang, dan ekuitas dana.

4. Laporan Operasional

Dalam laporan operasional menyajikan tentang ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan tersebut. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas (LAK) yang menunjukkan informasi kas yang berkaitan dengan tiga aktivitas entitas, yaitu: aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Selain itu, LAK juga menunjukkan transitoris yang memberikan informasi saldo awal, saldo akhir, penerimaan dan pengeluaran kas penda untuk periode tertentu.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi tentang kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan keuangan meliputi penjelasan atau rincian dari angka yang muncul dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan serta dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan SAP bahwa laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Pengguna laporan keuangan mendapatkan informasi yang dibutuhkan pada lembar muka laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). CALK yang dinyatakan dalam Standar Akuntansi Pemerintah dibuat dengan maksud agar laporan keuangan mudah dipahami pembaca secara luas karena laporan keuangan mengandung informasi yang dapat berpotensi terjadi kesalahpahaman antara pembacanya. Dalam CALK menyajikan penjelasan atas laporan keuangan, penjelasan dan referensi pos-pos laporan, penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh SAP hingga pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Arus Kas (LAK) dalam rangka pengungkapan yang memadai.

CaLK meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan LAK. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. CaLK mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut (Wikiapbn, 2015):

1. Mengungkapkan informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
2. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
3. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
4. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
5. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
6. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
7. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

Guna memenuhi transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah dituntut untuk menyajikan dan mengungkapkan elemen akuntansi laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan standar yang berlaku yaitu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 5 sampai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 9.

Tabel 2. 1. Elemen Pengungkapan Wajib

	PSAP Nomor 5 tentang Akuntansi Persediaan
1	Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2	Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan atau dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
3	Jenis, jumlah dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.
	PSAP Nomor 6 tentang Akuntansi Investasi
4	Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
5	Jenis-jenis investasi permanen dan investasi nonpermanen;
6	Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
7	Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
8	Investasi yang dinilai yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
9	Perubahan pos investasi
	PSAP Nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap
10	Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
11	Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode (penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, dan mutasi aset tetap lainnya).
12	Informasi Penyusutan (nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode).
13	Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
14	Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
15	Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
16	Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap

	Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
17	Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
18	Tanggal efektif penilaian kembali;
19	Jika ada, nama penilai independen;
20	Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
21	Nilai tercatat setiap jenis aset tetap;
	PSAP Nomor 8 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan
22	Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan dalam tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
23	Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
24	Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
25	Uang muka kerja yang diberikan;
26	Retensi
	PSAP Nomor 9 tentang Akuntansi Kewajiban
27	Daftar skedul utang
28	Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklarifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
29	Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
30	Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
31	Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
32	Perjanjian restrukturisasi utang (pengurangan pinjaman, modifikasi persyaratan utang, pengurangan tingkat bunga pinjaman, pengunduran jatuh tempo pinjaman, pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman, pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.)
33	Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
34	Biaya pinjaman (perlakuan biaya pinjaman, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan, tingkat kapitalisasi yang digunakan).

Sumber: (PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan)

Pengungkapan wajib dalam penelitian ini diukur dengan tingkat pengungkapan wajib, yaitu (Utami & Sulardi, 2020) :

$$\text{Pengungkapan LK Pemerintah Daerah} = \frac{\text{jumlah item yang diungkapkan}}{\text{Total item yang seharusnya diungkapkan}}$$

Secara konseptual pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Sedangkan secara teknis pengungkapan merupakan langkah akhir

dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penih statment keuangan (Suwardjono, 2015).

2.3 Temuan Audit

Menurut Mulyadi, (2014) mendefinisikan *auditing* secara umum adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pertanyaan-pertanyaan tentang kegiatan ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Menurut Arens *et al.*, (2015), Audit merupakan proses pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan serta melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Arens *et al.*, (2015) membagi Audit menjadi tiga jenis utama, yaitu audit operasional, audit ketaatan dan Audit Laporan keuangan. Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi, contohnya pemrosesan gaji. Audit ketaatan dilakukan untuk melihat apakah pihak yang di audit telah mengikuti prosedur dan aturan sesuai yang telah ditetapkan oleh otoritas, contohnya penentuan apakah persyaratan perpanjangan pinjaman bank telah dipenuhi. Audit laporan keuangan dilakukan untuk menilai apakah laporan keuangan telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu.

Sedangkan menurut Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, “Pemeriksaan adalah proses indentifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan kendala informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.”

Dalam melakukan audit terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, Arens (2015) membagi tahapan tersebut menjadi empat bagian, di antaranya:

1. Merencanakan dan merancang Pendekatan Audit

Pendekatan yang dilakukan oleh auditor dalam rangka melaksanakan audit didasarkan pada dua hal, yaitu bukti audit yang didapat harus kompeten agar dapat memenuhi tanggung jawab profesional auditor dan biaya yang dikeluarkan untuk mendapat bukti audit harus seminimal mungkin.

Kedua hal tersebut dapat dipenuhi dengan perencanaan penugasan yang baik di mana auditor melakukan prosedur penilaian risiko dengan asumsi laporan keuangan klien terdapat salah saji material. Untuk dapat membuat prosedur penilaian risiko, auditor harus memperoleh pemahaman tentang entitas dan lingkungannya, memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian, dan menilai risiko salah saji material.

2. Melaksanakan uji pengendalian dan uji substantif atas transaksi

Sebelum auditor memutuskan untuk mengurangi penilaian atas risiko pengendalian yang direncanakan, Auditor harus terlebih dahulu menguji efektivitas pengendalian tersebut. Prosedur ini disebut sebagai *test of control*. Auditor juga harus mengevaluasi pencatatan transaksi dengan memverifikasi jumlah moneter dari transaksi tersebut. Prosedur ini disebut *substantive test of transaction*.

3. Melaksanakan prosedur analitis dan pengujian rincian saldo

Prosedur analitis menggunakan perbandingan dan hubungan untuk menilai apakah saldo akun dan data-data dalam laporan keuangan dicatat secara wajar. Pengujian atas rincian saldo merupakan prosedur untuk menguji salah saji moneter dalam laporan keuangan.

4. Menyelesaikan Audit dan menerbitkan laporan Audit

Setelah auditor selesai melaksanakan setiap prosedur untuk setiap tujuan audit, auditor akan menghubungkan setiap informasi yang diperoleh untuk mencapai suatu kesimpulan tertentu mengenai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Proses ini bersifat subyektif karena opini yang dihasilkan sepenuhnya berdasar pada pertimbangan profesional Auditor. Saat proses Audit telah selesai dilakukan, akuntan publik akan menerbitkan suatu laporan audit.

Arens (2015) menyatakan dalam melakukan audit di sektor publik, Auditor tidak hanya memberi opini atas laporan keuangan, tetapi juga harus menerbitkan pendapat terkait pengendalian internal. Hal ini sejalan dengan yang dilakukan oleh BPK, di mana dalam Standar Pemeriksa Keuangan Negara (SKPN), dalam Laporan Hasil Pemeriksaannya (LHP), BPK juga berwenang untuk memberi pernyataan terkait pengendalian internal dari instansi yang di audit (Arens *et al.*, 2015).

Pengumpulan dan pemeriksaan informasi dalam melakukan audit tentu saja membutuhkan bukti audit yang berfungsi untuk mendukung kondisi laporan keuangan yang diperiksa. Menurut SA 500, Bukti audit merupakan informasi yang digunakan oleh auditor dalam menarik kesimpulan sebagai basis opini auditor. Dengan demikian, bukti audit yang didapat oleh auditor harus relevan dan andal agar opini yang dikeluarkan auditor bersifat akurat (IAPI - Institut Akuntan Publik Indonesia, 2021).

Pemeriksaan laporan keuangan yang dilaksanakan oleh BPK berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007. Berdasarkan SPKN, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan harus mengungkapkan bahwa pemeriksa telah melakukan pengujian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Selanjutnya mengenai pelaporan tentang pengendalian intern, SPKN mengatur bahwa laporan atas pengendalian intern harus mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian atas pelaporan keuangan yang dianggap sebagai kondisi yang dapat dilaporkan.

Hasil pemeriksaan keuangan disajikan dalam tiga bagian, yaitu: laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang memuat opini, laporan hasil pemeriksaan atas SPI, dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP yang memuat sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu

atau lebih permasalahan kelemahan SPI dan atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, yang mengakibatkan kerugian negara/daerah/perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan, ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidak efektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan didalam ikhtisar hasil pemeriksaan (IHP) disebut dengan kasus. Namun, istilah kasus tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial (Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, 2017).

Bila terdapat perbedaan antara bukti audit dengan kriteria, maka mengindikasikan adanya temuan Audit. Alpi & Ramadhan, (2018) mengatakan bahwa temuan audit adalah kondisi, kriteria, sebab dan akibat yang ditemui oleh auditor selama proses audit. Berdasarkan hasil penelitian Rizta & Nazwar, (2021) temuan audit secara parsial berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, berlawanan dengan hasil penelitian Marliani *et al.*, (2018) bahwa temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, hal ini dikarenakan keterbatasan atau tidak maksimalnya entitas dalam melakukan tindak lanjut sehingga yang menjadi penting adalah pada tindakan tindak lanjutnya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Temuan Audit mengindikasikan adanya kesalahan dalam laporan keuangan yang bila tidak dilakukan tindak lanjut dapat mempengaruhi auditor dalam memberikan opini audit. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara Pasal 16 Ayat 1 menyatakan bahwa “Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria tertentu:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah;
2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*);
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini Audit adalah pendapat yang dikeluarkan oleh auditor terkait kewajaran laporan keuangan audit, dalam semua hal yang material, yang didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan dengan prinsip akuntansi berterima umum. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik per 31 Maret 2011 (PSA 29 SA Seksi 508) (Ikatan Akuntan Indonesia, 2011), ada lima jenis pendapat akuntan yaitu:

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*)
2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku (*unqualified opinion with explanatory language*)
3. Pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*)
4. Pendapat tidak wajar (*adverse opinion*)
5. Pernyataan tidak memberikan pendapat (*disclaimer opinion*)

Tiga ciri temuan audit yang dikategorikan baik (Lubis, 2018):

1. Temuan Audit Harus didukung bukti yang memadai.
Temuan audit dengan dukungan bukti yang kuat akan mempermudah penyusunan laporan sekaligus mempermudah dalam mempersiapkan solusi untuk mengatasi permasalahan entitas yang diaudit.
2. Temuan Audit Harus Penting (material)
Penting tidaknya sesuatu temuan diindikasikan apabila pengguna laporan mengambil tindakan atau kebijakannya berdasarkan informasi yang ada dalam laporan atau temuan tersebut.
3. Temuan Audit harus Mengandung unsur temuan (kondisi, kriteria, sebabakibat)
Sering kali sulit membedakan secara jelas penyebab yang paling dominan terhadap suatu kondisi serta akibat yang dihasilkan dari penyebab tersebut. Auditor dituntut untuk cermat dalam menentukan hubungan sebab-akibat dari suatu temuan audit serta menentukan penyebab yang paling dominan.

Terdapat Perbedaan audit yang dilakukan pada badan atau perusahaan milik negara dengan swasta dikarenakan badan milik negara bersifat nirlaba yang berfokus pada pengelolaan kekayaan milik negara. Bastian, (2019) menyebutkan bahwa BPK melakukan tiga jenis audit yaitu audit (atas laporan) keuangan, audit kinerja maupun audit investigative. Hasil dari pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan dapat berupa opini, temuan, kesimpulan atau usulan rekomendasi.

2.4 Rasio Kemandirian

Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 279 Ayat 1 menyatakan bahwa: “Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada Daerah.”

Sedangkan yang dimaksud hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah kepada daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 279 Ayat 2 menyatakan bahwa “Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah sebagaimana dimaksud apa ayat 1 meliputi: (a)pemberian sumber penerimaan Daerah berupa pajak daerah dan restribusi daerah; (b)pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah; (c)pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk pemerintah daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan (d)pemberian pinjaman dan/atau hibah dana darurat dan insentif (fiskal).”

Kemandirian keuangan daerah diharapkan bisa terwujud dengan otonomi daerah karena tentunya pemerintah pusat menyadari bahwa yang paling mengetahui kondisi daerah adalah pemerintah daerah itu sendiri, baik dari segi permasalahan yang ada sampai kepada sumber pendapatan yang bisa digali oleh pemerintah daerah tersebut. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Menurut Mahmudi, (2013) mendefinisikan rasio kemandirian Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.

Menurut Halim, (2015) mendefinisikan rasio kemandirian sebagai berikut:

“Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD dan barang-barang inventaris milik daerah) dan kekayaan daerah yang dipisahkan. (Badan Usaha Milik Daerah /BUMD). Dalam penelitian ini, rasio kemandirian keuangan daerah diukur sebagai berikut (Machfud & Asnawi, 2021):

$$\text{Tingkat kemandirian daerah} = \frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{Total Pendapatan daerah}}$$

Rasio kemandirian keuangan daerah dapat dihitung dengan membandingkan antara jumlah penerimaan PAD dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta lain-lain pendapatan yang sah. Semakin tinggi angka rasio tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah.

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah begitu juga sebaliknya. Berikut menyajikan tingkat kemandirian keuangan beserta interpretasinya.

Tabel 2. 2. Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah sekali	<25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber: (Halim, 2015)

Terdapat empat hubungan situasional yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hubungan situasional tersebut yaitu (Halim, 2015):

1. Pola hubungan instruktif, di mana pemerintah daerah lebih banyak mendapatkan pengarahan dan petunjuk dari pemerintah pusat sehingga peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. Daerah ini dapat diklasifikasikan sebagai daerah yang tidak mampu atau kurang mampu melaksanakan urusan otonominya (tingkat kemandiriannya sangat kurang).
2. Pola hubungan konsultatif, pengarahan dan campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena kemampuan pemerintah mulai meningkat. Daerah ini diklasifikasikan sebagai daerah yang sedikit mampu melaksanakan urusan otonominya.
3. Pola hubungan partisipatif, pengarahan dan peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat pemerintah daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya sudah lebih tinggi. Daerah ini diklasifikasikan sebagai daerah yang mendekati mampu melaksanakan urusan otonominya.
4. Pola hubungan delegatif, pemerintah pusat sangat mengurangi atau meniadakan campur tangannya dalam mengurus urusan otonomi daerah, karena pemerintah daerah yang bersangkutan benar-benar telah matang dan mampu mandiri. Daerah ini diklasifikasikan sebagai daerah yang mampu melaksanakan urusan otonominya.

2.5 Dana Perimbangan /*Intergovernmental Revenue*

Intergovernmental Revenue dapat disebut dengan Dana Perimbangan (Dasmal *et al.*, 2020). Sejalan dengan pernyataan (Lesmanawati, 2019) yang menyebutkan *Intergovernmental revenue* biasa dikenal dengan dana perimbangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Perimbangan (*intergovernmental revenue*) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Kementerian Keuangan RI, (2017a) dalam Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dana perimbangan adalah jenis dana transfer yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berupa Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus untuk mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai kebutuhan dan prioritas Daerah, serta selaras dengan prioritas nasional.

Menurut (Halim, 2015) dana perimbangan (*intergovernmental revenue*) merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari otoritas pemerintah di atasnya. Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *intergovernmental revenue* adalah dana dari pemerintah pusat yang ditransfer ke pemerintah daerah untuk membantu dalam pembiayaan pembangunan daerah dalam rangka desentralisasi fiskal dimana pemerintah daerah tidak perlu untuk melakukan pembayaran kembali kepada pemerintah pusat. Dana perimbangan diberikan sesuai dengan perhitungan yang telah diatur dalam Undang-Undang yang berlaku.

Pemerintah daerah mempunyai potensi sumber keuangan yang berbeda. Daerah yang tidak mempunyai cukup dana yang bersumber dari daerahnya sendiri memerlukan bantuan dana dari pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik. Oleh karena itu, kontribusi dana

perimbangan dalam APBD dapat menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, *Intergovernmental Revenue* dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintah daerah dan antar-pemerintah daerah. Menurut (Bastian, 2015) tujuan dana perimbangan adalah:

1. Dapat lebih memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah;
2. Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggung jawab, dan;
3. Memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan.

Adanya implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia mengakibatkan kewenangan yang begitu luas diserahkan ke daerah membawa konsekuensi terhadap pembiayaan (Lesmanawati, 2019). Dengan adanya desentralisasi, pengawasan kepada pengelolaan keuangan daerah harus ditingkatkan agar sesuai dengan tujuan yang dirumuskan. Adanya perbedaan potensi sumber ekonomi mendorong terjadinya ketimpangan fiskal antar daerah. Dana perimbangan (*intergovernmental revenue*) merupakan salah satu bentuk upaya untuk meminimalisir adanya kesenjangan penerimaan daerah yang memiliki sumber pendapatan asli daerah yang lebih rendah dari daerah lain. *Intergovernmental revenue* diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menjalankan aktivitas daerah sehingga kinerja pemerintah daerah akan semakin baik. Menurut (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan, 2005), Dana Perimbangan terdiri dari:

1. Dana Bagi Hasil

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan

kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Bagi Hasil bersumber dari:

- a. Pajak, terdiri atas:
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan;
 - ii. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - iii. Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21.
- b. Sumber Daya Alam, berasal dari:
 - i. Kehutanan;
 - ii. Pertambangan Umum;
 - iii. Perikanan;
 - iv. Pertambangan Minyak Bumi;
 - v. Pertambangan Gas Bumi;
 - vi. Pertambangan Panas Bumi.

2. Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 proporsi Dana Alokasi Umum antara daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan imbangannya kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota. Jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Netto yang ditetapkan dalam APBN.

Dana Alokasi umum merupakan sarana untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah dan disisi lain juga sebagai sumber pembiayaan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum lebih diprioritaskan kepada daerah yang mempunyai fiskal rendah.

3. Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas normal.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

2.6 Tekanan Politik

Tekanan merupakan suatu dorongan dan juga sebuah penolakan agar dilaksanakannya sebuah kebijakan dari luar organisasi yaitu seperti peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah (Zenita & Basri, 2021). *Political pressure* yang terjadi dalam proses pengungkapan laporan keuangan maupun penganggaran keuangan memang tidak bisa dihindari. hal ini dikarenakan bentuk-bentuk dari politik memberikan dampak yang besar bagi proses pembuatan dan pengungkapan laporan keuangan.

Zaman, (2016) mendefinisikan partai politik sebagai organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. setiap definisi tentang partai politik akan berhubungan dengan kekuasaan (jabatan publik atau jabatan politik) sebagai tujuan umum yang dimiliki oleh setiap partai politik ketika melakukan aktivitasnya. Posisi partai politik dalam pilkada sangat strategis. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa semua calon yang berhak maju

dalam pertarungan harus dicalonkan partai politik tertentu. Calon kepala daerah yang berhak maju harus melalui partai politik atau gabungan partai politik yang mempunyai 15 % kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau suara pada pemilihan legislatif.

Zaman, (2016) menyatakan bahwa sebagai organisasi yang mengartikulasikan kepentingan rakyat, partai politik sering dihubungkan dengan kelompok kepentingan (*interest group*) dan kelompok penekan (*pressure group*). Partai politik dibentuk guna mempengaruhi jalannya pemerintahan dengan mengajukan calon-calon untuk jabatan publik termasuk kepala daerah. Wujud nyata partai politik dalam menghasilkan kader untuk didelegasikan sebagai pemimpin adalah keikutsertaannya dalam pilkada. Partai politik sendiri ataupun anggota partai yang mencalonkan menjadi calon kepala daerah turut berkompetisi dalam pilkada. Pilkada hadir sebagai arena bagi partai politik dalam bersaing dengan partai politik lainnya untuk mendapat kekuasaan lokal.

Teori keagenan menjelaskan bahwa kompetisi politik berkaitan dengan motivasi dan kebijakan pemerintah daerah. Informasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah lebih banyak terutama informasi yang dimiliki oleh kepala daerah. Tekanan politik yang tinggi menjadikan kepala daerah dan pejabatnya dituntut untuk lebih transparan terhadap informasi yang dimilikinya. Tuntutan tersebut bertujuan agar kepala daerah tidak hanya memenuhi kepentingannya dan partai politik pendukungnya. Pelaksanaan pemerintahan tidak hanya diawasi oleh masyarakat, tetapi juga oleh lawan kepala daerah pada saat pilkada maupun partai politik yang tidak mengusung kepala daerah terpilih. Teori institusional juga menjelaskan bahwa adanya asimetri informasi maka masyarakat menuntut pemerintah daerah untuk mengutamakan kepentingan masyarakat. Semakin tinggi tekanan politik maka diharapkan pemerintah daerah juga dapat meningkatkan pemenuhan tuntutan dan kepentingan masyarakat (Nairobi, 2014).

Tekanan politik juga mampu mempengaruhi tingkat kemampuan pemerintah jadi menurun, terutama yang terkait pada penerapan suatu kebijakan maupun prosedur.

Dengan adanya tekanan politik dapat berakibatkan pada praktik-praktik yang ada penelitian ini yaitu khusus pengungkapan laporan keuangan (Pradita *et al.*, 2019). Oleh karena itu, dengan adanya tekanan politik mengakibatkan mampu mengganggu penerapan transparansi pelaporan keuangan yang relatif sama antara OPD yang satu dengan yang lainnya. Berdasarkan teori diatas, diduga bahwa pengungkapan laporan keuangan dipengaruhi oleh tekanan politik.

2.7 Karakteristik Pemerintah Daerah

Karakteristik pemerintah daerah merupakan ciri maupun bentuk khusus yang dimiliki oleh pemerintah daerah atau sebagai tanda dalam membedakan sebuah pemerintah daerah satu dengan pemerintah daerah lainnya. Dalam karakteristik pemerintahan ini diharapkan dapat mengungkapkan atau menjelaskan karakteristik yang melekat pada pemerintahan daerah, karena karakteristik pemerintah daerah dapat memprediksi dalam tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah (Dianti & Herawati, 2022).

2.7.1 Populasi / Jumlah Penduduk

Menurut Badan Pusat Statistik, (2018), menjelaskan bahwa penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Data kependudukan ini dapat diperoleh melalui sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali, dimana perhitungannya dilakukan terhadap seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia termasuk warga negara asing kecuali anggota diplomatik negara tetangga beserta keluarganya. Apabila terdapat tahun yang tidak dilakukan sensus penduduk maka data akan diperoleh dari hasil proyeksi dimana perhitungan yang dilakukan berdasarkan asumsi dari komponen-komponen perubahan penduduk yakni kelahiran, kematian dan migrasi.

Jumlah penduduk merupakan sekelompok orang yang menetap dan mendiami suatu wilayah tertentu dalam jangka waktu yang relatif lama. Jumlah penduduk

yang ada di tiap daerah berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat lainnya sesuai dengan demografi. Proses demografi yang ada dipengaruhi oleh jumlah kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk yang mana jumlah kelahiran dan kematian tidak terjadi serentak di tiap daerah, begitu juga dengan perpindahan (Dewi & Adi, 2019).

Jumlah penduduk dalam suatu daerah merupakan suatu hal yang krusial bagi pemerintah. Berdasarkan teori demand, salah satu faktor yang dapat meningkatkan permintaan akan suatu barang ataupun jasa yakni dikarenakan bertambahnya jumlah penduduk yang semakin meningkat (Halim, 2015). Hal ini tidak menutup kemungkinan akan berlaku pada permintaan rakyat terhadap pemerintah. Jika jumlah penduduk bertambah banyak maka tanggung jawab dari pemerintah terhadap rakyatnya akan semakin besar. Tidak menutup kemungkinan juga jika permintaan penduduk atas transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan juga akan semakin meningkat. Hal ini yang akan menjadi dorongan bagi pemerintah untuk dapat meningkatkan kualitas dalam penyajian laporan keuangannya sebagai bukti pertanggungjawaban atas tugas yang harus dilaksanakannya.

2.7.2 Kekayaan Daerah

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, (2020) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia versi *online*, kekayaan (*wealth*) diartikan sebagai semua harta milik dan kekayaan potensi yang dimiliki negara untuk keperluan seluruh rakyat. Menurut (Lesmanawati, 2019) kemakmuran (*wealth*) merupakan suatu keadaan yang seimbang antara kebutuhan dengan benda pemuas kebutuhan. Pernyataan tersebut selaras dengan pendapat (Kurniawati *et al.*, 2020), kekayaan (*wealth*) adalah kemampuan untuk mencukupi kebutuhan. Ernawati & Jaeni, (2018) menjelaskan bahwa *wealth* (kemakmuran) merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah.

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa *wealth* merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhannya. Sebagaimana penelitian Kurniati dan Siddi (2020)(Kurniati & Siddi, 2020) bahwa kekayaan pemerintah daerah atau *wealth* merupakan tingkat kekayaan daerah yang diukur dari PAD per kapita. Pada penelitian ini, pengukuran kekayaan pemerintah daerah diukur dengan proporsi total PAD dengan total jumlah penduduk yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kekayaan Daerah} = \frac{\text{Total PAD}}{\text{JUMLAH PENDUDUK}}$$

2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel dibawah ini merupakan *review* dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan pengaruh temuan audit, rasio kemandirian, tekanan politik intergovernmental revenue dan karakteristik pemerintah daerah, terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Tabel 2. 3. Penelitian Terdahulu.

No	Penulis	Judul	Hasil penelitian
1	Finakesti, Lestavira Yulina, Bainil Hartaty, Sri (2022)	Determinan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Determinan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan	Temuan penelitian menunjukkan bahwa variabel kekayaan daerah, rasio kemandirian daerah, Jumlah OPD, ketergantungan dan ukuran legislatif memiliki perpengaruh yang positif signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan.

2	Jessica, Novertasya Suhartono, Sugi (2020)	Pengaruh Intergovernmental Revenue, Indeks Pembangunan Manusia, Kekayaan Daerah, Dan Opini Audit Terhadap Pengungkapan Sukarela:(Studi Empiris: Pemerintah Daerah Di Pulau Sumatera Tahun 2018)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia dan Opini Audit berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Sukarela. Sedangkan Intergovernmental Revenue dan Kekayaan Daerah berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sukarela
3	Fikrinah Naopal Sri Rahayu Siska Priyandani Yudowati (2017)	Pengaruh Karakteristik Daerah, Jumlah Penduduk, Temuan Audit, Dan Opini Audit Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Secara parsial, umur pemerintahan dan opini audit memiliki pengaruh positif sedangkan ukuran pemerintahan, jumlah penduduk dan temuan audit secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap LKPD kabupaten/kota di Jawa Barat periode 2014-2015
4	Putri, Errina Aprilia Rahayu, Sri Lestari, Tri Utami (2022)	Opini Audit, Dana Perimbangan, Kondisi Keuangan dan Pengungkapan Informasi Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil penelitian menunjukkan opini audit dan kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah. Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah
5	Kurniati, Sari Siddi, Purnama (2020)	Pengaruh Kekayaan Daerah, Jenis Pemerintahan, Dan Kualitas Audit Terhadap Pengungkapan Internet-Based Financial Reporting	Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah <i>logistic regression</i> . Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kekayaan pemerintah daerah, kompleksitas pemerintah daerah, tipe pemerintah daerah, dan kualitas audit meningkatkan kemungkinan pengungkapan IBFR

6	Hadi, Deka Anugrah Setiawan, Mia Angelina (2020)	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Pemerintah Daerah, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengungkapan Internet Budgeting Reporting	Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>internet budgeting reporting</i> . Kekayaan pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>internet budgeting reporting</i> . Jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>internet budgeting reporting</i> pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera.
7	Vini Zenita Yesi Mutia Basri Rofika (2021)	Tekanan Eksternal, Faktor Politik, Pengendalian Internal Dan Gaya Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel faktor politik, pengendalian internal dan gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap transparansi pelaporan keuangan. Adapun variabel tekanan eksternal memiliki pengaruh negatif terhadap transparansi pelaporan keuangan.
8	Andriani, Meri Santi, Elfitri Mustika, Rasyidah (2019)	Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota provinsi sumatera barat tahun anggaran 2014-2016	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran legislatif dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD, tetapi ukuran pemerintah daerah, tingkat ketergantungan, umur pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, diferensiasi fungsional dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD
9	Kusuma, Rianti Aswar, Khoirul Ermawati, Ermawati (2021)	Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia: Suatu Tinjauan Empiris	Hasil riset ini menunjukkan bahwa <i>legislatif size</i> berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan. <i>Local government budget expenditure, audit finding</i> , dan <i>local government size</i> tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan.

10	Dianti, Maisy Martha Herawati, Herawati (2022)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Rasio Kemandirian Dan Ukuran Legislatif Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh signifikan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan jumlah penduduk, rasio kemandirian dan ukuran legislatif tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah provinsi.
11	Marliani, Meli Amin, Mohammad Mawardi, Muhammad Cholid (2018)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah, Kompleksitas, Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur)	Secara parsial PAD, DEPEND, AGE, SKPD dan AUDIT berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi, sedangkan variabel ASSET berpengaruh positif signifikan serta variabel LEG berpengaruh negative signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan.
12	Utami, Shafira Ramadhia Sulardi, Sulardi (2020)	Pengaruh karakteristik pemerintah daerah, opini audit, dan rasio kemandirian terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah	Hasil analisis pada 458 pemda menunjukkan rerata pengungkapan pada laporan keuangan pemda sebesar 60,42%. Lebih lanjut, hasil analisis juga menunjukkan variabel populasi dan IPM berpengaruh positif pada pengungkapan laporan keuangan pemda, sedangkan variabel opini audit dan rasio kemandirian daerah tidak memengaruhi pengungkapan laporan keuangan pemda
13	Rizta, Naswa Afra Nazwar, Chairul (2021)	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemandirian Daerah, Intergovernmental Revenue, Ukuran Legislatif, Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat	Ukuran pemerintah daerah, intergovernmental revenue secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Kemandirian daerah, temuan audit secara parsial berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan

		Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	laporan keuangan pemerintah daerah dan ukuran legislatif secara parsial berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah
14	Dewi, Viona Indra Adi, Priyo Hari (2019)	Pengaruh Tingkat Pendidikan, Jumlah Penduduk, dan Opini Audit terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil penelitian ini menunjukkan variabel jumlah penduduk memiliki pengaruh negatif tidak signifikan, sedangkan variabel tingkat pendidikan dan opini audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah
15	Mistika, Mega Deviani, Deviani (2023)	Pengaruh Faktor Politik dalam Pengungkapan Transparansi Informasi Website Pemerintah Daerah: Studi Empiris Kabupaten/Kota Pulau Jawa dan Bali Periode 2017-2020	Tingginya tingkat kompetisi yang terjadi dalam proses pemerintahan daerah tidak mempengaruhi bagaimana proses pengungkapan transparansi. Kekuatan politik yang menyokong pejabat pemerintah dalam melaksanakan roda pemerintahan tidak berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan transparansi informasi. Pejabat pemerintah yang didukung oleh partai utama pemenang pemilu nasional dianggap tidak mempunyai pengaruh signifikan dalam melaksanakan transparansi informasi melalui website pemda.
16	Putri, Anggi Nadila Hardiningsih, Pancawati (2023)	Kesesuaian karakteristik pemerintah daerah dan opini audit dengan pengungkapan laporan keuangan	Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Total aset dan Pendapatan asli daerah tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Opini audit berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

17	Wance, Marno (2017)	Politik Anggaran Eksekutif Dan Legislatif Pada Pembahasan APBD Kabupaten Buru Selatan 2015	Pola Interaksi Decesional Yaitu Pola pertentangan yang berlangsung pada perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Platform Anggaran Sementara (PPAS) sehingga mengakibatkan keterlambatan penetapan APBD, pola interaksi kekuasaan yang terjadi tawar menawar (bargaining) untuk melakukan pertukaran kepentingan legislatif kepada Eksekutif yang tidak diakomodir Pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) di masing-masing SKPD
18	Utami, Rinda Dwi Hapsari, Dini Wahjoe Mahardika, Dewa P K (2019)	Kompetisi Politik, Pendapatan Asli Daerah Dan Opini Audit Terhadap Implementasi E-Government	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap implementasi e-government. Sedangkan kompetisi politik dan opini audit tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap implementasi e-government
19	(Hadianto & Murtin, 2020)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Internet Financial Reporting (IFR) di Indonesia	Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio persaingan politik dan kekayaan daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan. Sedangkan ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan. Selanjutnya, debt financing berpengaruh negatif signifikan. Terakhir, pendapatan per kapita dan opini audit berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan IFR

Sumber: Berbagai Artikel Jurnal Penelitian, 2023

2.9 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan hasil penelitian yang tidak konsisten dengan variabel-variabel tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk menganalisis lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan

pemerintah daerah pada kabupaten/kota Provinsi se-Sumatera dengan menggunakan data tahun 2021-2022.

2.9.1 Pengaruh Temuan Audit Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK dalam laporan keuangan pemerintah daerah atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Priharjanto & Wardani, (2017) Temuan audit BPK pada laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan adanya pelanggaran atau ketidakpatuhan pemerintah daerah pada perundangan yang berlaku. Sementara itu Tama & Adi, (2018) menjelaskan bahwa selama proses audit dapat menginformasikan sesuatu hal yang penting yang terkait dengan masalah-masalah yang terdapat pada auditee. Menurut prosedur audit internal, BPK melaporkan setiap hasil audit kepada subyek audit dari pemerintah pusat/daerah dan inspektorat selalu memberikan rekomendasi kepada subyek audit sehingga setiap temuan audit mungkin terpecahkan. BPK umumnya membuat rekomendasi berdasarkan audit temuan untuk menyelesaikan keuangan subjek audit yang bermasalah (Imtinan & Hasibuan, 2021).

Temuan audit ini akan berbanding lurus dengan tingkat pengungkapan yang akan di sajikan dalam CaLK, yaitu semakin banyak jumlah temuan yang di temukan maka semakin banyak jumlah pengungkapan yang akan disajikan. Hal ini sesuai dengan penelitian Imtinan & Hasibuan, (2021) yang menyatakan adanya upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas temuan audit tahun lalu agar tidak terjadi lagi pada periode berikutnya sehingga tingkat pengungkapan laporan keuangan menjadi tinggi. Adanya temuan ini menyebabkan BPK akan memberikan rekomendasi sehingga terjadi peningkatan pengungkapan dan koreksi. Pengungkapan yang lebih dilakukan sebagai upaya perbaikan dan koreksi atas temuan audit yang ditemukan BPK dan menunjukkan pada publik adanya perbaikan kualitas yang dilakukan pemerintah daerah atas saran dari BPK. Hasil

penelitian Rizta & Nazwar, (2021) temuan audit secara parsial berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁ = Temuan audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.9.2 Pengaruh Rasio Kemandirian Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Rasio Kemandirian Daerah yang merupakan suatu cara untuk mengetahui tingkat kemandirian daerah dalam membiayai dan mengatur rumah tangga pemerintahannya sendiri. Usaha yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai kemandirian daerah adalah dengan cara menggali sumber keuangan sendiri yang independen, yaitu yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, selain itu dengan meminimalisasi bantuan dari Pemerintah Pusat (Rizta & Nazwar, 2021). Artinya, semakin tinggi rasio tersebut, semakin rendah pula tingkat ketergantungan suatu daerah pada sumber pendanaan eksternal dan semakin tinggi tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah. Maka dari itu, dapat ditarik simpulan bahwa semakin tinggi rasio kemandirian, maka pemda akan meningkatkan atau memperluas pengungkapan pada laporan keuangannya.

Berdasarkan penelitian Finakesti *et al.*, (2022) serta Rizta & Nazwar, (2021) yang mengungkapkan bahwa rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini kemungkinan tuntutan akuntabilitas publik mewajibkan pemerintah daerah mempertanggungjawabkan sumber daya yang telah digunakannya kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan restribusi daerah. Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₂ = Rasio kemandirian berpengaruh positif terhadap pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.9.3 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penerimaan pemerintah daerah, tidak hanya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah tetapi juga berasal dari *Intergovernmental revenue* atau yang lebih dikenal dengan Dana Perimbangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Perimbangan (*Intergovernmental Revenue*) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. *Intergovernmental revenue* atau dana perimbangan memiliki kontribusi besar terhadap APBD. Namun pada pelaksanaannya perlu adanya pengawasan sebagai bentuk keterbukaan dan akuntabilitas. Jika pengelolaannya dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan peraturan yang ditetapkan maka akan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kinerja daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Dana Perimbangan (*Intergovernmental Revenue*) terdiri dari Dana Alokasi umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil. Penerimaan *intergovernmental revenue* juga mencerminkan kemampuan keuangan dari suatu daerah untuk mengelola keuangan daerah tersebut. Berdasarkan penelitian Jessica & Suhartono, (2020) yang memberikan fakta bahwa *Intergovernmental Revenue* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Tingginya ketergantungan daerah dengan *intergovernmental revenue* yang diterima dari pemerintah pusat atau semakin besarnya *intergovernmental revenue* yang diperoleh maka kemampuan keuangan daerah tersebut untuk menggali potensi dari daerahnya sendiri semakin rendah dan kemandirian keuangan juga akan rendah sehingga mengindikasikan kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut juga rendah. Semakin besar *intergovernmental revenue* dari pemerintah pusat kepada daerah, menjadikan daerah semakin bergantung secara finansial pada pemerintah pusat yang mengindikasikan buruknya kinerja keuangan. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Putri *et al.*, (2022) membuktikan Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan informasi keuangan

pemerintah daerah. Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₃ = Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.9.4 Pengaruh Tekanan Politik Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kekuatan politik yang terbentuk dalam pelaksanaan pemerintahan akan memberikan keuntungan bagi pihak yang menjabat. Kekuatan politik tersebut memberikan kebebasan yang lebih luas bagi pejabat daerah dalam merumuskan kebijakan, termasuk dalam hal pengungkapan informasi apa saja yang dapat dipublikasikan maupun transparansi kepada publik. Teori keagenan menyatakan bahwa pemerintah daerah cenderung mengutamakan kepentingan pribadi dan partai politik, sehingga memunculkan terjadinya asimetri informasi. Teori institusional juga menyatakan bahwa entitas yang memiliki tekanan politik yang besar akan semakin *publicly visible* dan mendapatkan tekanan yang lebih besar dalam menyediakan informasi keuangan daerah (Hanifah *et al.*, 2017).

Pemerintahan Indonesia yang menganut sistem multi partai, tidak terdapat partai yang memiliki suara mayoritas seperti yang terdapat pada pemerintahan di negara Spanyol. Dengan demikian, partai koalisi dan oposisi menjadi suatu keharusan. Semakin besar partai oposisi atas kepala daerah, semakin tinggi perhatian masyarakat terhadap kinerja mereka. Karena tuntutan yang tinggi tersebut, masyarakat akan membutuhkan informasi sehingga mendorong keterbukaan informasi yang lebih besar. Hal tersebut juga diperkuat Wance, (2017) dalam penelitiannya yang mengatakan bahwa faktor-faktor yang sangat berpengaruh keterlambatan penetapan anggaran yaitu *personal background*, *political background* dan pemahaman anggota DPRD tentang pengelolaan anggaran, hal ini disebabkan karena latar belakang individu dalam aktivitas politik. Peningkatan tekanan politik akan memunculkan pengawasan dari pihak lain dan masyarakat

dalam memantau pejabat yang kadang lupa dengan janji-janji yang dibuatnya pada saat pemilu dulu (Nosihana & Yaya, 2016).

Tingkat tekanan politik yang tinggi maka akan mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan informasi keuangan daerah secara lebih transparan, sehingga dapat memenuhi kepentingan berbagai pihak. Tekanan politik yang tinggi diharapkan akan meningkatkan keterbukaan informasi keuangan daerah pada laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang memiliki tekanan politik tinggi akan mempunyai insentif yang lebih kuat untuk meningkatkan reputasi dan *public image* mereka melalui penyediaan informasi keuangan daerah dan pemberian kemudahan dalam mengakses informasi keuangan daerah pada *website* resminya. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Yudistira & Rohman, (2022) Lingkungan Politik berpengaruh secara positif terhadap transparansi pemerintah daerah. Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₄ = Tekanan Politik berpengaruh positif terhadap pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.9.5 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Semakin besar populasi penduduk yang ada di suatu daerah maka permintaan kepada pemerintah terkait pertanggung jawaban dalam pengungkapan LKPD juga akan semakin tinggi, sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat. Sesuai dengan *Agency Theory*, penduduk merupakan salah satu *Stakeholder* terpenting Pemerintah Daerah. Jumlah penduduk yang tinggi menunjukkan kebutuhan penyediaan layanan publik akan semakin tinggi. Jumlah penduduk semakin banyak, akan mengakibatkan tuntutan akan pengungkapan yang dilakukan oleh Pemda akan semakin besar pula, sesuai dengan fungsi Pemerintah sebagai abdi masyarakat.

Besarnya pelayanan publik yang diberikan pemda untuk tujuan memaksimalkan kesejahteraan penduduknya ditentukan oleh jumlah penduduk wilayah tersebut.

Semakin tinggi jumlah penduduk suatu daerah akan semakin tinggi juga tanggung jawab serta pelayanan yang diberikan pemda untuk memaksimalkan kesejahteraan penduduknya. Daerah dengan populasi besar akan tunduk pada pemeriksaan publik yang lebih besar juga, serta pemangku kepentingan yang lebih bervariasi. Pemangku kepentingan yang bervariasi mempunyai preferensi serta keperluan informasi yang berbeda. Sebab akuntabilitas pelayanan yang disediakan dan tingginya dan tekanan permintaan yang tinggi terhadap informasi kinerja pemerintah karena banyaknya pemangku kepentingan, pemerintah daerah yang lebih tinggi akan menerbitkan lebih banyak informasi (Harahap & Prabowo, 2023). Hasil penelitian Andriani *et al.*, (2019) serta (Utami & Sulardi, 2020) yang mengungkapkan bahwa variabel populasi yang diproksikan dengan jumlah penduduk berpengaruh positif pada pengungkapan laporan keuangan pemda. Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₅ = Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.9.6 Pengaruh Kekayaan Daerah Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kekayaan pemerintah daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang bersumber dan dipungut langsung oleh pemerintah daerah. Pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD) dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah merupakan sumber dari PAD. Suatu daerah yang memiliki tingkat kekayaan dalam jumlah besar cenderung rentan terhadap penyalahgunaan, oleh sebab itu masyarakat sebagai principal mempunyai keinginan untuk mengawasi dan menilai kinerja pemerintah melalui transparansi atas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Di sisi lain pemerintah dengan total kekayaan yang besar harus menanggung biaya pengawasan yang lebih tinggi dalam upaya memenuhi tuntutan transparansi dari masyarakat selaku principal. Sehingga melalui publikasi laporan keuangan daerahnya merupakan salah satu cara yang efektif untuk dapat menyampaikan informasi keuangan secara detail dengan biaya yang lebih murah dan dapat dengan mudah untuk dijangkau guna

mengurangi asimetri informasi yang terjadi antara pemerintah daerah dan masyarakat.

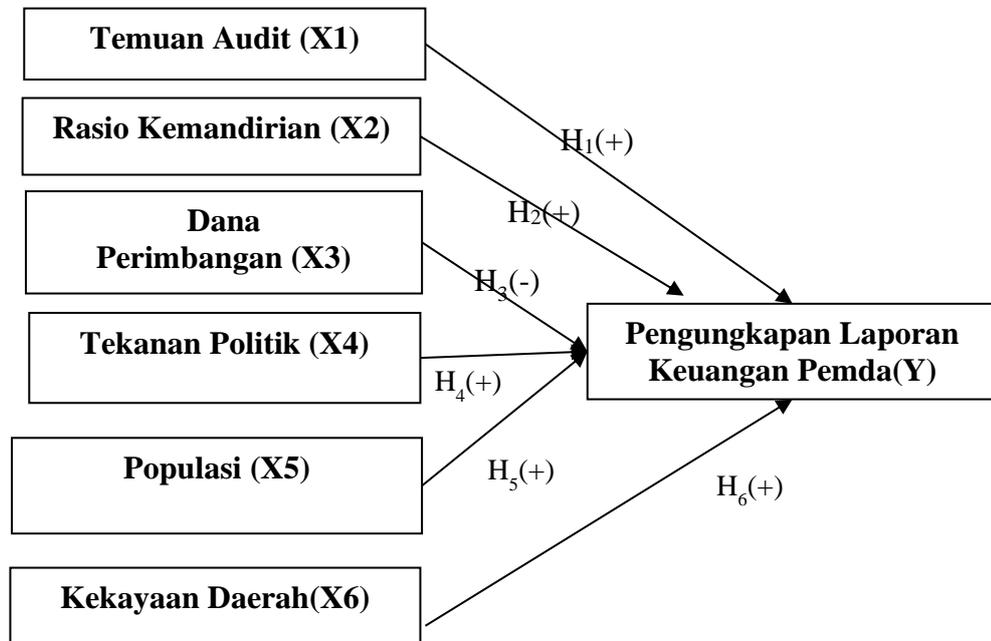
Semakin tinggi kekayaan daerah, pengawasan dari masyarakat juga akan semakin ketat karena terdapat kekhawatiran masyarakat akan terjadinya penyelewengan dana yang mungkin terjadi. Hal tersebut dapat menjadi motivasi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengungkapan informasi keuangan berupa laporan keuangan. Semakin tinggi kekayaan daerah maka pemerintah akan semakin termotivasi untuk melakukan pengungkapan laporan keuangan, sehingga kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan penelitian Finakesti *et al.*, (2022) serta Kurniati & Siddi, (2020) memberikan bukti bahwa kekayaan daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H_6 = Kekayaan Daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.10 Kerangka Pemikiran

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) masih menjadi perdebatan. Namun dari hasil penelitian terdahulu masih terdapat perbedaan-perbedaan. Berdasarkan penelitian terdahulu ada beberapa variabel yang memiliki hasil yang berbeda yaitu opini audit, tingkat ketergantungan, dana perimbangan, ukuran legislatif, jumlah penduduk, dan kekayaan daerah. Penelitian terdahulu banyak menggunakan populasi dan sampel pada pemerintahan di Pulau Jawa dan pada pemerintahan di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang tidak konsisten dengan variabel-variabel tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk menganalisis lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di wilayah Sumatera dengan menggunakan data terbaru yaitu data tahun 2021-2022.

Dari pengembangan hipotesis yang telah dipaparkan maka didapat kerangka penelitian sebagai berikut:



Gambar 2. 1. Kerangka Pemikiran
Sumber: Modifikasi Peneliti, 2023.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu, sekaligus untuk menjawab pertanyaan terkait sesuatu pada saat berlangsungnya proses riset (Supriadi, 2020).

3.1.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dengan sumber data sekunder. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan, sedangkan data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dengan melalui media perantara. Sumber data tersebut diperoleh dari masing-masing website resmi pemerintah daerah yang menjadi sampel penelitian dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan dokumentasi.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi Penelitian

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang di dalamnya terdapat subjek dan objek yang mempunyai karakteristik tertentu yang telah dipilih oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sudjana, 2016). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota yang ada di Wilayah Sumatera di Tahun 2021-2022, berdasarkan data dari BPS Pulau Sumatera terdiri dari 10 provinsi yang didalamnya terdapat 154 kabupaten dan kota. Dari total 154 kabupaten dan kota terbagi menjadi 120 kabupaten dan 34 kota.

3.2.2 Sampel Penelitian

Menurut Sudjana, (2016) sampel merupakan sebagian kecil dari populasi yang telah dipilih dari prosedur tertentu sehingga dapat menjadi wakil populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel (teknik *sampling*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah *nonprobability sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini kabupaten/kota yang menjadi sampel dipilih berdasarkan *Purposive Sampling* (kriteria yang dikehendaki). Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten/kota yang terletak di wilayah Pulau Sumatera.
2. Kabupaten/kota yang memiliki kelengkapan data variabel penelitian.

3.3 Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menganalisis tentang pengaruh opini audit, rasio kemandirian, *intergovernmental revenue* dan karakteristik pemerintah daerah, terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode penelitian dan analisis yang dirancang berdasarkan masing-masing variabel agar menghasilkan hasil yang akurat.

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel bebas yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dari penelitian ini adalah Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Variabel ini mengacu dari penelitian Utami dan Sulardi (2019) dengan menggunakan sistem penilaian yang dibuat dengan checklist pengungkapan yang diwajibkan atau dimandatkan dalam SAP, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pengungkapan LK Pemerintah Daerah} = \frac{\text{jumlah item yang diungkapkan}}{\text{Total item yang seharusnya diungkapkan}}$$

Kriteria penilaian tersebut dibagi menjadi 5 kategori: sangat tinggi (81%-100%), tinggi (61%-80%), cukup (41%-60%), rendah (21%-40%) dan sangat rendah (0%-20%).

3.3.2 Variabel Independen

Variabel independent merupakan jenis variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan timbulnya variabel dependen. Variabel independent yang digunakan dalam penelitian ini adalah opini audit, rasio kemandirian, intergovernmental revenue dan karakteristik pemerintah daerah yang diwakili oleh populasi, ukuran legislatif dan kekayaan daerah.

1. Temuan Audit

Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK dalam laporan keuangan pemerintah daerah atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Naopal *et al.*, 2017). Temuan audit ini akan berbanding lurus dengan tingkat pengungkapan yang akan di sajikan dalam CaLK, yaitu semakin banyak jumlah temuan yang di temukan maka semakin banyak jumlah pengungkapan yang akan disajikan. Ukuran variabel ini dilihat dari jumlah temuan yang ditemukan BPK dalam laporan keuangan pemerintah daerah dengan rasio nominal.

2. Rasio Kemandirian

Variabel ini menggambarkan tingkat kemandirian daerah dalam menyediakan kebutuhan pendanaan pembangunan di daerah, variabel ini menggunakan PAD yang merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri. Pendapatan yang termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Tingkat kemandirian daerah} = \frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{Total Pendapatan daerah}}$$

3. Dana Perimbangan / *Intergovernmental revenue*

Intergovernmental revenue atau Dana perimbangan Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004 merupakan dana yang diperoleh pemerintah daerah dari APBN yang diberikan dari pemerintah pusat untuk pendanaan kebutuhan daerah. Dana perimbangan diukur dengan total dana perimbangan (E. A. Putri *et al.*, 2022).

$$IR = \text{Logaritma Natural (LN)}(DBH + DAU + DAK)$$

4. Tekanan Politik

Tekanan politik digambarkan dengan seberapa besar persaingan politik antara kepala daerah yang menjabat saat ini dengan para saingan politiknya.

Tekanan politik diukur dengan jumlah persentase anggota dewan yang tidak mendukung kepala daerah yang menjabat saat ini.

$$\text{Tekanan Politik} = \% \text{ Anggota dewan yang tidak mendukung}$$

5. Populasi

Populasi atau jumlah penduduk di Indonesia ditentukan melalui sensus penduduk yang selama ini dilakukan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) setiap sepuluh tahun. Populasi merupakan proksi kompleksitas pemda, di mana semakin tinggi populasi atau semakin kompleks sebuah pemda, maka semakin tinggi pula pengungkapan yang semestinya disampaikan pada laporan keuangan.

$$\text{Populasi} = \text{Logaritma Natural (LN)} \text{jumlah penduduk}$$

6. Kekayaan Daerah

Sebagaimana penelitian Kurniati dan Siddi (2020) bahwa kekayaan pemerintah daerah atau wealth merupakan tingkat kekayaan daerah yang diukur dari PAD per kapita. Pada penelitian ini, pengukuran kekayaan pemerintah daerah diukur dengan proporsi total PAD dengan total jumlah penduduk yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kekayaan Daerah} = \frac{\text{Total PAD}}{\text{JUMLAH PENDUDUK}}$$

3.4 Teknis Analisis Data

3.4.1 Analisis Deskriptif

Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan apa yang telah ditemukan pada hasil penelitian dan memberikan informasi sesuai dengan apa yang telah diperoleh pada sampel penelitian. Teknik deskriptif pada penelitian ini bermaksud untuk menginterpretasikan nilai maksimum, minimum, mean, dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian.

3.4.2 Analisis Regresi

Untuk mengetahui pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen, maka digunakan model regresi dengan persamaan sebagai berikut:

$$PLK = \beta_0 + \beta_1 TA_{it} + \beta_2 RK_{it} + \beta_3 IR_{it} + \beta_4 TP_{it} + \beta_5 JP_{it} + \beta_6 KD_{it} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (1)$$

Dimana:

PLK	: Pengungkapan LK pemerintah daerah Kabupaten/Kota Sumatera
TA	: temuan audit
RK	: rasio kemandirian
IR	: dana perimbangan
TP	: tekanan politik
JP	: populasi
KD	: kekayaan daerah
β_0	: intersep
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: koefisien regresi yang ditaksir

3.5 Uji Hipotesis

3.5.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini digunakan untuk melihat kemampuan suatu model dalam menjelaskan varians variabel terikat yang pada dasarnya diukur dengan koefisien determinasi. Nilai R^2 yang rendah menunjukkan kapasitas faktor bebas dalam memberikan semua data yang diharapkan dapat meramalkan perubahan variabel terikat. Jika variabel menunjukkan nilai mendekati 1, maka hamper semua informasi yang

dibutuhkan untuk memprediksi variansi variabel dependen. R^2 yang disesuaikan dianggap 0 jika hasilnya negatif (Ghozali, 2017).

3.5.2 Uji Statistik F

Kesesuaian model regresi dalam penelitian ini dinilai dengan menggunakan uji statistic F. H_0 didukung jika $p < 0,05$ atau F dihitung $> F$ tabel singkat signifikansi 0,05 digunakan untuk pengujian. Hasil ditolak jika nilai signifikansi lebih besar dari yang menunjukkan model regresi tidak baik. Model regresi dapat dipakai dan uji tahap selanjutnya dapat dilakukan jika nilai signifikansi $< 0,05$ (Ghozali, 2017).

3.5.3 Uji Statistik t

Uji statistik t mengindikasikan seberapa jauh korelasi satu variabel independen guna menjelaskan ragam variabel dependen. Sehingga disimpulkan sebagai berikut (Ghozali, 2017):

- Jika p value < 0.05 maka H_0 diterima
- Jika nilai p > 0.05 maka H_0 ditolak.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh temuan audit, rasio kemandirian, dana perimbangan, tekanan politik dan karakteristik pemerintah daerah, terhadap pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera. Penelitian dilakukan terhadap pemerintah daerah se-Sumatera, Wilayah Pulau Sumatera terdiri dari 10 provinsi dan 154 pemerintah daerah kabupaten/kota dengan jumlah observasi selama 2 tahun yaitu tahun 2021 dan tahun 2022 sebesar 308 item observasi. Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel rasio kemandirian, dana perimbangan, dan karakteristik pemerintah daerah yang terdiri dari populasi dan kekayaan daerah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera. Sedangkan variabel temuan audit dan tekanan politik terbukti mempunyai pengaruh yang positif terhadap pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera, dengan variabel yang mempunyai pengaruh terbesar yaitu temuan audit.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang dapat diperbaiki dalam penelitian selanjutnya yaitu penelitian ini menggunakan jumlah temuan audit yang ada di LHP BPK sebagai proksi variabel temuan audit, tidak memisahkan temuan audit yang bersifat administratif ataupun temuan audit yang bersifat teknis. Selain itu, penelitian ini menggunakan jumlah anggota dewan sebagai opisisi sebagai ukuran variabel tekanan politik.

5.3 Implikasi

Implikasi dari penelitian ini adalah pemerintah daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi serta penerima dana perimbangan yang tinggi seharusnya mengungkapkan informasi yang lebih besar yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan. Hal ini bertujuan agar laporan keuangan dapat menjadi relevan dan berkualitas sebagai dasar pengambilan keputusan para pemberi dana tersebut dalam menyalurkan dana yang akan diberikan. Selain itu, pentingnya adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pemerintah daerah akan pentingnya pengungkapan laporan keuangan. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan, pelatihan, dan pembinaan terkait manajemen keuangan dan pengelolaan laporan keuangan. Selain itu, diperlukan juga upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipercaya mengenai keuangan daerah tersebut..

Implikasi dari pengaruh tekanan politik terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah adalah perlunya adanya mekanisme pengawasan dan kontrol yang ketat untuk mencegah terjadinya manipulasi atau kecurangan dalam pelaporan keuangan. Selain itu, penting juga bagi pemerintah daerah untuk membangun budaya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik sehingga dapat mengurangi risiko adanya tekanan politik yang merugikan dalam proses pengungkapan laporan keuangan.

5.4 Saran

Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian yang telah disebutkan, maka beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya
 - a. Melakukan studi lebih mendalam mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Sumatera, seperti tingkat korupsi, transparansi kebijakan, dan kepemimpinan pemerintah daerah.

- b. Melakukan perbandingan antara tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Sumatera dengan daerah-daerah lain di Indonesia untuk melihat perbedaan dan kesamaan faktor yang mempengaruhi pengungkapan tersebut.
2. Saran untuk pemerintah Daerah
 - a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan cara meningkatkan pengungkapan informasi keuangan yang relevan dan akurat kepada publik.
 - b. Memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan, seperti temuan audit, serta tekanan politik untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pengungkapan laporan keuangan di Kabupaten/Kota Sumatera.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, I. M. P., Utama, S., & Rossieta, H. (2018). Transparency of local government in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 3(1), 123–138.
- Alpi, M. F., & Ramadhan, P. R. (2018). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3), 103–114.
- Amaliah, E. F., & Haryanto, H. (2019). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2).
- Andriani, M., Santi, E., & Mustika, R. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota provinsi sumatera barat tahun anggaran 2014-2016. *Akuntansi Dan Manajemen*, 14(1), 1–14.
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2015). *Auditing & Jasa Assurance* (Edisi Keli). Erlangga.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, 7 (2017).
- Badan Pusat Statistik. (2018). *No Title*.
- Bastian, I. (2015). *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Erlangga.
- Bastian, I. (2019). Lingkup Akuntansi Sektor Publik. *Lingkup Akuntansi Sektor Publik*, 1–52.
- beritasatu.com. (2023). *Penyusunan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah Libatkan Sejumlah Lembaga*. Beritasatu.Com/Nasional.
<https://www.beritasatu.com/nasional/1041744/penyusunan-indeks-tata-kelola-pemerintahan-daerah-libatkan-sejumlah-lembaga/2>
- BSKDN. (2022). *Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bisa Jadi Acuan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang*

dan Menengah. Litbang.Kemendagri.Go.Id.
<https://litbang.kemendagri.go.id/website/indeks-tata-kelola-pemerintahan-daerah-bisa-jadi-acuan-perencanaan-pembangunan-jangka-panjang-dan-menengah/>

- Carolina, M. (2019). Pengaruh Opini Audit Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Pemerintah Di Indonesia. *Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 4(1), 145–163.
- Dasmar, T., Basri, Y. M., & Indrawati, N. (2020). Pengaruh Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Intergovernmental Revenue, Temuan Audit (BPK) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Riau). *Jurnal Al-Iqtishad*, 16(2), 39–57.
- Deegan, C. (2004). Introduction: The legitimising effect of social and environmental disclosures—a theoretical foundation. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 15(3), 282–311.
- Dewata, E., Jauhari, H., & Khoirunisa, A. (2020). *The influence of complexity and audit findings on the disclosure regional financial statements in Indonesia*.
- Dewi, V. I., & Adi, P. H. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Jumlah Penduduk, dan Opini Audit terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah. *International Journal of Social Science and Business*, 3(4), 358–366.
- Dianti, M. M., & Herawati, H. (2022). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Rasio Kemandirian Dan Ukuran Legislatif Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Bung Hatta*, 21(1).
- Effendi, M. A. (2016). *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi* (Edisi 2). Salemba Empat.
- Ernawati, E., & Jaeni, J. (2018). Faktor Prnentu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2015-2017). *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 7(1).

- Fahmi, I. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. Alfabeta.
- Fajaruddin, F. (2021). Konsep Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 662–671.
- Finakesti, L., Yulina, B., & Hartaty, S. (2022). Determinan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Determinan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 6(1), 71–80.
- Ghozali, I. (2017). Structural Equation Modeling Konsep dan Aplikasi dengan Program Amos 24. In *Universitas Diponegoro*.
- Ghozali, I., & Chariri, A. (2016). *Teori Akuntansi Internasional Financial Reporting Systems (IFRS)*.
- Gujarati, D. (2014). *Ekonomi Dasar (terjemahan)* (A. Haerani (ed.)). Erlangga.
- Hadi, D. A., & Setiawan, M. A. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Pemerintah Daerah, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengungkapan Internet Budgeting Reporting. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2099–2114.
- Hadianto, D., & Murtin, A. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Internet Financial Reporting (IFR) di Indonesia. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4 (2), 33–45.
- Halim, A. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Hanifah, F. F., Suryarini, T., & Mukibad, H. (2017). Pengaruh Kompetisi Politik, IPM, Dan Leverage Terhadap Ketersediaan Dan Keteraksesan Informasi Keuangan Daerah. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XX*.
- Harahap, P. S., & Prabowo, T. J. W. (2023). Analisis Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Website Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun

- 2018-2021). *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(2).
- IAPI - Institut Akuntan Publik Indonesia. (2021). *SA 500 (Revisi 2021) : Bukti Audit*. Institut Akuntan Publik Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2011). *SPAP PSA 29 Seksi 508 Laporan Auditor Atas Laporan Keuangan Auditan*.
- Imtinan, G., & Hasibuan, D. H. M. (2021). Pengaruh Temuan Audit Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Kementerian. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 215–224.
- Iqbal, M. (2018). Apakah Kecukupan Pengungkapan LKPD Dipertimbangkan dalam Perumusan Opini Audit BPK?(Studi Kasus di Indonesia). *Accounting and Business Information Systems Journal*, 2(4).
- Iriyanto, F. N., & Nugroho, P. I. (2015). Pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap Praktik Pengungkapan Sustainability Report dan Kinerja Ekonomi. *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 3(1).
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*.
[https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Jessica, N., & Suhartono, S. (2020). Pengaruh Intergovernmental Revenue, Indeks Pembangunan Manusia, Kekayaan Daerah, Dan Opini Audit Terhadap Pengungkapan Sukarela:(Studi Empiris: Pemerintah Daerah Di Pulau Sumatera Tahun 2018). *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 14–27.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2021). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. Dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> Diakses Tanggal. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Kementrian Keuangan RI. (2017a). *Dana Perimbangan*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
<https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-jenis-jenis-dana-perimbangan>

- Kementerian Keuangan RI. (2017b). *Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah*. Djpk.Kemenkeu.Go.Id.
<https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5750>
- Kurniati, S., & Siddi, P. (2020). Pengaruh Kekayaan Daerah, Jenis Pemerintahan, Dan Kualitas Audit Terhadap Pengungkapan Internet-Based Financial Reporting. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 4(1), 1–13.
- Kurniawati, D., Sarwono, A. E., & Sunarti, S. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Dan Kekayaan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2015-2018). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(3), 237–248.
- Kusuma, R., Aswar, K., & Ermawati, E. (2021). Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia: Suatu Tinjauan Empiris. *Konferensi Riset Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 581–591.
- Lesmanawati, D. (2019). Pengaruh local government wealth, intergovernmental revenue dan opini audit terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di indonesia secara online. *InFestasi*, 15(2), 109–116.
- Lubis, A. W. (2018). *Diktat Audit Kinerja Sektor Publik*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Luthfi, M., & Sari, V. F. (2023). Analisis Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Sumatera. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 5(2), 771–787.
- Machfud, M., & Asnawi, A. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, 5(1), 14–31.
- Mahmudi. (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.

- Marliani, M., Amin, M., & Mawardi, M. C. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah, Kompleksitas, Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur). *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 7(10).
- Mistika, M., & Deviani, D. (2023). Pengaruh Faktor Politik dalam Pengungkapan Transparansi Informasi Website Pemerintah Daerah: Studi Empiris Kabupaten/Kota Pulau Jawa dan Bali Periode 2017-2020. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 5(3), 952–962.
- Modlin, S. (2019). Local government finance office orientation revisited: Actually, it's all about control. *International Journal of Public Administration*, 42(3), 230–239.
- Moento, P. A., Firman, F., & Yusuf, A. P. (2019). Good Governance Dalam Pemerintahan. *Musamus Journal of Public Administration*, 1(2), 10–16.
- Mulyadi. (2014). *Sistem Akuntansi* (Cetakan Ke). Salemba Empat.
- Nachrowi, N. D. (2018). *Pendekatan populer dan praktis ekonometrika untuk analisis ekonomi dan keuangan*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Nairobi, N. (2014). *KOMPETISI POLITIK LOKAL DI INDONESIA: STUDI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI*. Universitas Gadjah Mada.
- Naopal, F., Rahayu, S., & Yudowati, S. P. (2017). Pengaruh karakteristik daerah, jumlah penduduk, temuan audit, dan opini audit terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 7(1), 56–68.
- Napitupulu, D., Lubis, M. R., Revida, E., Putra, S. H., Saputra, S., Negara, E. S., & Simarmata, J. (2020). *E-Government: Implementasi, Strategi dan Inovasi*. Yayasan Kita Menulis.
- Nosihana, A., & Yaya, R. (2016). Internet financial reporting dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia. *Jurnal Dinamika*

Akuntansi Dan Bisnis, 3(2), 89–104.

Nur, B., & Murwaningsari, E. (2020). Dampak ukuran dan ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi*, 4(2), 139–156.

Nuraeni, A., & Rini, R. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan Islamic social reporting. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 4(1), 77–83.

Okfitasari, A., Sundari, S., & Meikhati, E. (2020). Karakteristik Pemerintah Daerah, Opini dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01).

Padang, N. N. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Seminar Nasional Manajemen Dan Akuntansi*, 1.

Palangda, L., & Dame, J. M. (2020). Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Kualitas Pelayanan Publik. *PUBLIC POLICY; Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik Dan Bisnis*, 1(2), 273–287.

Permatasari, R. A., & Trisnawati, R. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR)(Studi Empiris pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar pada Bank Indonesia Tahun 2015-2018)*.

Pradita, K. D., Hartono, A., & Mustoffa, A. F. (2019). Pengaruh tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, dan komitmen manajemen terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(2), 87–100.

Priharjanto, A., & Wardani, Y. Y. (2017). Pengaruh Temuan, Tingkat Penyimpangan, Opini Audit, Dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Info Artha*, 1, 97–110.

Putri, A. N., & Hardiningsih, P. (2023). Kesesuaian karakteristik pemerintah daerah dan opini audit dengan pengungkapan laporan keuangan. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi*,

Manajemen Dan Akuntansi, 12(1), 62–71.

- Putri, E. A., Rahayu, S., & Lestari, T. U. (2022). Opini Audit, Dana Perimbangan, Kondisi Keuangan dan Pengungkapan Informasi Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(8), 2132.
- Putri, W. M., & Arza, F. I. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1111–1130.
- Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, 44 HLM (2004).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, 32 HLM (2005).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, (2010).
- Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 212 HLM (2014).
- Rimayanti, R., & Jubaedah, S. (2017). Determinan Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pada Perusahaan Indeks Saham Syariah Indonesia. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(2).
- Rizta, N. A., & Nazwar, C. (2021). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemandirian Daerah, Intergovernmental Revenue, Ukuran Legislatif, Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 1(3), 82–91.
- Rosadi, S., & Okfitasari, A. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan terhadap Opini Audit BPK. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 19(02), 148–157.
- Sari, A. P., Martani, D., & Setyaningrum, D. (2015). Pengaruh temuan audit, tindak lanjut hasil pemeriksaan dan kualitas sumber daya manusia terhadap opini audit melalui tingkat pengungkapan laporan keuangan kementerian/lembaga.

Simposium Nasional Akuntansi XVIII. Medan.

- Sari, P. I. P., Suhairi, S., & Syofriyeni, N. (2021). Analisis Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Ditinjau dari Akun Persediaan di Sumatera. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 23–36.
- Scott, W. R. (2015). *Financial Accounting Theory* (Seventh Ed). Pearson Prentice Hall.
- Silaban, F. P., & Suryani, E. (2020). The Influence of Audit Capacity Stress, Industry Specialization Auditor and Audit Committee on Audit Quality. *E-Proceeding of Management*, 7(2), 2687–2695.
- Soleman, M. T., Pontoh, W., & Budiarmo, N. S. (2019). Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Kepulauan Talaud). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1).
- Sudjana, N. (2016). *Metode Statistika*. PT. Tarsido.
- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Supriadi, I. (2020). *Metode Riset Akuntansi. ed. pertama*. Deepublish.
- Suwardjono. (2015). *Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan*. BPF.
- Suwarjuwono, P., & Ritonga, I. T. (2017). Analisis Tingkat Pengungkapan Akun Persediaan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 173–188.
- Tama, I. G. M. A. A., & Adi, P. H. (2018). Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah, Ukuran Pemerintah, dan Temuan Audit terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Perspektif Akuntansi*, 1(1), 91–113.
- Tandiontong, M. (2016). Kualitas audit dan pengukurannya. *Bandung: Alfabeta*, 1–248.
- Umar, Z. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi

- Inspektorat Aceh. *Kolegial*, 6(2), 136–148.
- United Nations. (2023). *INDONESIA - UN E-Gov Survey MSQ 2022*. UN E-Government Survey.
<https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/78-Indonesia>
- Utami, S. R., & Sulardi, S. (2020). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah, opini audit, dan rasio kemandirian terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 19(2), 253.
- Wance, M. (2017). Politik Anggaran Eksekutif Dan Legislatif Pada Pembahasan APBD Kabupaten Buru Selatan 2015. *JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan Dan Otonomi Daerah)*, 2(2), 178–204.
- Widarjono, A. (2015). *Analisis Multivariat Terapan*. UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Wikiapbn. (2015). *Catatan atas Laporan Keuangan*. Wikiapbn Sebuah Ensiklopedia Kementerian Keuangan.
<https://www.wikiapbn.org/catatan-atas-laporan-keuangan/>
- Yudistira, Y., & Rohman, A. (2022). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Transparansi Pemerintah Daerah (Studi pada LKPD di Indonesia Tahun Anggaran 2018 dan 2019). *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(1).
- Yunifa, L., & Agung, J. (2017). Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Tingkat Pengungkapan Risiko Pada Perusahaan Manufaktur. *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 6, No, Hlm. 1-12.
- Zaman, R. K. (2016). Perjalanan panjang pilkada serentak. In A. Fathoni (Ed.), *(No Title)* (Cetakan 1). Mizan Media Utama.
- Zenita, V., & Basri, Y. M. (2021). Tekanan Eksternal, Faktor Politik, Pengendalian Internal Dan Gaya Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Kajian Akuntansi*, 22(1), 88–108.